ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Oleh:
Siti Hayati
NIM: 18913061

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Oleh:
Siti Hayati
NIM: 18913061

Pembimbing :
Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI HAYATI

Nim : 18913061

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Kecuali bagian yang ditunjuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta 28 Mei 2021

Yang menyatakan



Siti Hayati

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2077/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

Ditulis oleh : Siti Hayati

N. I. M. : 18913061

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Juni 2021
Ketua,

Dr. Dra. Junānah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Siti Hayati
Tempat/tgl lahir : Semana, 17 Agustus 1996
N. I. M. : 18913061
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ( )

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ( )

Pembimbing : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ( )

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ( )

Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.. ( )

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 18 Juni 2021

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: **2026**/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

Ditulis oleh : Siti Hayati

NIM : 18913061

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021
Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .

D:\Data\Tesis\ND2020-21

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

Nama : Siti Hayati

Nim : 18913061

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Dr .Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah :8)[1]

[1] Departemen Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya". (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) hlm..86

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringkan salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Tesis ini aku persembahkan kepada:

1. Keluargaku tercinta, abah Hasyim Asikin, dan Ibu Komariah serta adik-adiku Yusli, Ririn dan Fahri yang selalu senantiasa memberikan doa yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat tiada henti, motivasi, dukungan, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Sahabat dan teman, sedaerah baik di Jogja maupun di lampung yang sering meluangkan waktu mendengarkan curahan hati penulis.
3. Segenap Civitas akademik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

ABSTRAK

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Siti Hayati

NIM 18913061

Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi pada satu sisi, namun di sisi yang lain menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi se Pulau Jawa dan urutan termiskin ke-12 secara nasional. Kontradiksi ini menimbulkan anggapan bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta bahagia dengan kemiskinannya. Berdasarkan penerimaan PDRB, jelas terlihat masih adanya ketimpangan antarkabupaten. Penelitian ini menggunakan indeks wiliamson dan indeks entropi theil untuk mengukur tingkat ketimpangan. Hasil penelitian menyebutkan selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakartamengalami fluktuasi. Salah satu faktor kenaikan pertumbuhan ekonomi karena adanya penerimaan dari sektor kontruksi yang cukup besar ditambah dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulonprogo dan pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang. Perhitungan indeks wiliamson Yogyakarta memperoleh nilai indeks wilamson 0.45 hal ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Yogyakarta masih tergolong rendah. Sedangkan menurut perhitungan entropi theil, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai Indeks Entropi Theil (S Relatif) sebesar 0.89 hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kecil. Kab. sleman merupakan daerah yang mendapatkan nilai entropi theil terbesar, yang mencapai 1.21 dengan kontribusi sebesar 30.6% terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penyumbang terbesar kedua ditempati oleh kota yogykarta dan penyumbang terkecil ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakartaada di Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi sebesar 10.3 %. Menurut Ibnu Khaldun, pertumbuhan dan ketimpangan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemerintah (G), syariah (S), kekayaan ekonomi /sumber daya alam (W), masyarakat/sumber daya manusia (N), pembangunan (D), dan keadilan (J).

Kata kunci : *Pertumbuhan, Ketimpangan, Ibnu Khaldun, D.I Yogyakarta*

ABSTRACT

ANALYSIS OF GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN THE PERSPECTIVE OF IBNU KHALDUN

Siti Hayati

NIM 18913061

The predicate of Special Region of Yogyakarta as a region with the highest level of happiness on one side; however, on the other side, it becomes a province with the highest level of poverty in Java Island and places the 12th poorest province at national level. This contradiction emerges the assumption that people in Yogyakarta are happy with the poverty. Based on the GDRP revenue, it is clearly seen the inequality inter-regions. This study used the Williamson index and EntropyTheil index to measure the level of inequality.

The research results showed that over the last five years, the rate of economic growth in Special Region of Yogyakarta has fluctuated. One of the factors for the increasing economic growth is related to the construction of Yogyakarta International Airport (YIA) in Kulon Progo Regency and the construction of supporting infrastructure facilities. The calculation of the Williamson index in Yogyakarta obtained the value of 0.45 showing that the level of income inequality in the regions in Yogyakarta province is still relatively low. Meanwhile, according to the entropytheil, Yogyakarta province obtained Entropy Theil Index (Relative S) value of 0.89, indicating that the level of inequality in Yogyakarta Province is still relatively low.

Slemanis a regency that had the highest entropy Theil index reaching 1.21 with the contribution of 30.6% towards the inequality in Special Region of Yogyakarta. The second highest contribution was found from Yogyakarta city and the lowest contribution of inequality in Special Region of Yogyakarta was found in Kulonprogo Regent with the contribution of 10.3 %. According to IbnuKhaldun, the growth and inequality of a region is determined by a number of factors including government (G), syari'ah (S), economic wealth/natural resources (W), people/human resource (N), development (D), and justice (J).

Keywords : *Growth, Inequality, Ibnu Khaldun, D.I Yogyakarta*

April 30, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*R*	-
ز	Zā’	*Z*	-

س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Komater balik keatas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
ھ	hā’	*H*	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	**Ditulis**	***Muta'addidah***
عدّة	**Ditulis**	***'iddah***

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	**Ditulis**	***ḥikmah***
جزية	**Ditulis**	***Jizyah***

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	**Ditulis**	***Karāmah al-auliyā'***

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	**Ditulis**	***zākat al-fiṭr***

IV. Vokal Pendek

ـَـ	***faṭḥah***	**Ditulis**	**A**
ـِـ	***Kasrah***	**Ditulis**	**I**

ـُـ	*ḍammah*	**Ditulis**	**U**

V. Vokal Panjang

1	***Fatḥah* + *alif***	**Ditulis**	***ā***
	جاهلية	**Ditulis**	***jāhiliyah***
2	***Fatḥah* + *ya'* mati**	**Ditulis**	***ā***
	تنسى	**Ditulis**	***tansā***
3	***Kasrah* + *ya'* mati**	**Ditulis**	***Ī***
	كريم	**Ditulis**	***Karīm***
4	***ḍammah* + *wawu*mati**	**Ditulis**	***Ū***
	فروض	**Ditulis**	***Furūḍ***

VI. Vokal Rangkap

1	***Fatḥah* + *ya'* mati**	**Ditulis**	***Ai***
	بينكم	**Ditulis**	***Bainakum***
2	***Fatḥah* + *wawu* mati**	**Ditulis**	***Au***
	قول	**Ditulis**	***Qaul***

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	**Ditulis**	***a'antum***
أعدت	**Ditulis**	***u'iddat***
لئن شكرتم	**Ditulis**	***la'insyakartum***

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	**Ditulis**	***al-Qur'ān***
القياس	**Ditulis**	***al-Qiyās***

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	**Ditulis**	***as-Samā'***
الشمس	**Ditulis**	***asy-Syams***

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	**Ditulis**	***Zawi al-furūḍ***
أهل السنة	**Ditulis**	***Ahl as-Sunnah***

KATA PENGANTAR

بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف
الاءنبياءوالمرسلين سيدنامحمد وعلى اله واصحبه اجمعين،اما بعد

Ucapan syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala pertolongan, kemudahan serta rahmat dan kasih-Nya sehingga tesis ini dapat selesai dengan judul "Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun". Penelitian ini penulis ajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat dan pengikutnya.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya sebab penulis masih kurang pengetahuan dan pengalaman. Penyusunan tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik berupa saran dan masukan yang diberikan secara langsung ataupun tidak khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor dari Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag, selaku ketua jurusan Studi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang juga merupakan pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku ketua jurusan dari Ilmu Agama Islam Program Magister di Universitas Islam Indonesia
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, seluruh staff Tata Usaha dan Perpustakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ibu Pengurus BPS Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia melaporkan secara transparan dan akuntabel laporan tahunan lembaganya.
7. Bapak Ibu Pengurus BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia melaporkan secara transparan dan akuntabel laporan tahunan lembaganya.
8. Keluargaku tercinta , Abah Hasyim Asikin dan Ibu Komariah yang mensupport penulis dari segalanya moril materil, doa dan kasih sayang yang tidak pernah habisnya. Pada keluarga besar yang saling menyemangati satu dan lainnya.
9. Para sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan yang berlimpah dalam menajalani kehidupan dunia ini. Aamin Aamin yaRabbal Aalaamiin.

Yogyakarta, 13 April 2021



Siti Hayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS ..... **iv**
NOTA DINAS ..... **v**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xvi**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xix**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian **8**
1. Fokus penelitia 8
2. Pertanyaan penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **9**
1. Tujuan penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan **11**
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI **12**
A. Penelitian Terdahulu **12**
B. Kerangka Teori **51**

1. Pertumbuhan Ekonomi 51
2. Pembangunan Ekonomi 55
3. Ketimpangan Ekonomi 60
4. Pemikiran Ibnu Khaldun 71

BAB III. METODE PENELITIAN 79

A. Jenis Dan Sumber Data 79

1. Jenis Penelitian 80
2. Lokasi Penelitian 80
3. Sumber Data 80

B. Teknik Pengumpulan Data 78

C. Teknik Analisis Data 83

1. Reduksi Data 83
2. Penyajian Data 84
3. Verifikasi Data 84

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 87

A. Hasil Penelitian 87

1. Geografis Dan Administratif Diy 87
2. Historiografi Ibnu Khaldun 89

B. Pembahasan 93

1. Pertumbuhan Ekonomi Diy Perpspektif Ibnu Khaldun 93
2. Ketimpangan Ekonomi Diy Perspektif Ibnu Khaldun 104
3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Diy Perspektif Ibnu Khaldun 111

BAB V. PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1 PDRB Provinsi DIY ADHB Menurut Lapangan Usaha 2018-2019, *3*

Tabel 2 Penelitian Terdahulu, *26*

Tabel 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulonpnrogo ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen), *86*

Tabel 4 Pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/ kota di provinsi DIY, *88*

Tabel 5 Realisasi pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta, *89*

Tabel 6 Komposisi realisasi pendapatan daerah DIY, 2018-2019, *91*

Tabel 7 Penerimaan Pajak Dan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, *92*

Tabel 8 Indeks wiliamson Daerah Istimewa Yogyakarta, *95*

Tabel 9 Perhitungan indeks entropi theil Provinsi DIY, *97*

Tabel 10 Jumlah penduduk Provinsi DIY, *97*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan luas wilayah, 81

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, *87*

Gambar 3 Indeks Entropi Theil Berdasarkan Lapangan Usaha, *100*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan Bebas Plagiasi, *129*

Lampiran 2 Curriculum Vitae, *130*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan.[1]

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan menimbulkan ketimpangan wilayah dan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainya, sementara pemerataan ekonomi tanpa partumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah.[2] Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.[3]

---

[1] Michel P Todaro, "Pembangunan Ekonomi (Edisi Ke-Sebelas Jilid I)", (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm.. 20

[2] Sabda Imani Rubiarko, Rachmad Kresna Sakti "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011." *Jurnal Ilmiah* Vol. 1 No. 2, 2013, hlm.. 1-14.

[3] Nurhuda, Muluk Dan Prasetyo. "Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP),*Vol. 1 No. 4 2011, hlm.. 110-119.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.[1] Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki luas wilayah 3.185,80 km2, terdiri dari empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah dan PDRB terkecil di Pulau Jawa, dan term Indeks Gini tertinggi. angka kemiskinan Yogyakarta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 mencapai angka 11,7, melebihi tingkat nasional, yaitu 9,41. Menduduki posisi 12 berdasarkan angka kemiskinan tertinggi tingkat nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin se-Jawa. Bahkan, rasio Gini atau ketimpangan pendapatannya

[1] Lincolin Arsyad, "*Ekonomi Pembangunan"*, (Yogyakarta: BPSTIE-YKPN,1999) hlm..44

merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni 0,423. Berikut ini tabel PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta perkabupaten tahun 2018-2019.

Tabel 1

PDRB DIY ADHB Menurut Lapangan Usaha 2018-2019 (Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2019	2018
Sleman	47.580.784,02	43.793.253,60
kota Yogyakarta	36.599.057,00	33.818.853.1
bantul	26.345.477,40	24.443.273,94
gunung kidul	18.889.873,33	17.540.149,36
kulonprogo	8.772.582,56	7.729.569,13

Sumber data: BPS D.I Yogyakarta (diolah)

Berdasarkan data bps Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten yang menepati posisi PDRB tertinggi berada di kab. Sleman dan terendah ada di kab. Kulonprogo. Pertumbuhan PDRB ekonomi yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan terjadinya Perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi semakin besar[2] Disini peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Daerah

[2] Sukirno, S. "*Ekonomi Pembangunan. Proses Masalah Dan Dasar Kebijaksanaan". (*Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985). hlm. 24

Istimewa Yogyakarta lebih lanjut apakah dengan adanya perbedaan posisi PDRB tersebut dapat menyebabkan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kab. Sleman berhasil memperoleh PDRB tertinggi yang mana total PDRB kabupaten sleman tahun 2019 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 47.580.784,02 juta rupiah yang menempati posisi PDRB tertinggi, dengan rincian sebanyak Rp. 30,77 juta atau sekitar 64,68% digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga, 6.71 juta digunakan untuk konsumsi pemerintah dan 19,64 juta digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto sebagai bagian dari investasi.[3] Dan PDRB terendah ditempati daerah kulon progo dengan total PDRB sebesar 8.772.582,56 sehingga jelas sekali ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan ekonomi menjadi menarik untuk dibahas karena ketimpangan ekonomi merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi wilayah-wilayah yang tertinggal.[4]

Ketimpangan pembangunan wilayah seringkali menjadi permasalahan yang serius karena berimplikasi terhadap kelancaran proses pembangunan. Akibatnya Beberapa daerah berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Menurut

---

[3] Bps Kab. Sleman, Produk Domestic Regional Bruto, Diunduh Melalui Https://Slemankab.Bps.Go.Id/Publication.Html Pada Tanggal 14 Juni 2020

[4] Pritha Aprianoor Dan Muhammad Muktiali, "Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Teknik PWK* Volume 4 Nomor 4 2015 hlm.. 484-498

Tambunan ketimpangan pembangunan wilayah bisa disebabkan oleh banyak faktor antara lain pusat kegiatan ekonomi, perbedaan sumberdaya, aksesibilitas, kondisi demografis dan alokasi investasi. Mohiuddin dan Hashia juga menambahkan faktor struktur institusi dan diskriminasi kebijakan sebagai faktor penyebab ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila disetiap daerah ditemukan wilayah yang maju dan wilayah terbelakang sebagaimana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.[5]

Tambunan dalam bukunya "perekonomian Indonesia: beberapa masalah penting", menyatakan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga relatif lebih makmur, sementara disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya. Menurut Delis dkk, mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan proses

[5] Luthfian Riza Sanjaya, Endriatmo Soetarto, Andrea Emma Pravitasari, "Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Pemekarannya)", *Tata Loka* Volume 21 Nomor 2, Mei 2019, hlm.. 253-266

pembangunan antar daerah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam aspek ekonomi.[6]

Pembahasan tentang faktor-faktor pendukung dan masalah yang menghambat dalam pertumbuhan ekonomi memang menjadi diskursus yang sangat menarik dan terus berkembang hingga saat ini. Banyak pemikir berlomba-lomba untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul dalam penerapan teori-teori pembangunan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dipercaya menjadi jalan keluar yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pemenuhan kebutuhan penduduk dan menurunkan kesenjangan serta menaikkan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pendapatan yang dipe roleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk juga dalam hal pembangunan.

Sejarah telah mencatat banyak ilmuwan yang berfokus pada bidang ekonomi islam salah satunya Ibnu Khaldun (1332-1404), jauh hari telah menulis sebuah konsep unik dalam karyanya terkait masalah-masalah ekonomi, disini Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematika, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain-lain Bahkan menurut hasil penelitian Mohammad dengan menggunakan pendekatan Ibnu

[6] Dellis, Arman., Roesmeli., Dan Novita Sari. (N.D). "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Di Indonesia Periode 1990-2008", *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* Vol. 4.No. 02. 2013

Khaldun, ia menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun juga memberikan konsep tentang pembangunan ekonomi yang ideal. Artinya ekonomi pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia *(basic needs),* dan "dematerialisasi". Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban suatu negara.[7]

Chapra mengidentifikasi dan mempopulerkan model dinamis Ibnu Khaldun diatas dengan *Ibn Khaldun's Theory of Development*. Model dinamik dari Ibnu Khaldun tentang pertumbuhan ekonomi ini bisa dikatakan adalah sumber pertama yang membahas khusus tentang analisis faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Ibnu Khaldun. Salah satu kekuatan dalam model Ibnu Khaldun menurut Chapra adalah karakternya yang dinamis dan multidisiplin, karena melibatkan berbagai macam variabel ekonomi maupun non ekonomi. Secara jelas, Ibnu Khaldun menempatkan faktor yang menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu populasi yang besar atau pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan dan jumlah penduduk mendorong berbagai macam faktor yang membuat perekonomian berkembang. Akumulasi modal, pertanian dan industri juga bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Ibnu Khaldun memasukan pula faktor non ekonomi sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sosial. Melalui konsep asabiya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pertumbuhan

[7] Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Principles Of Sustainable Development In Ibnu Khaldun's Economic Thought", *Malaysian Journal Of Real Estate,* Volume 5, Number 1 2010 hlm..1-18

ekonomi dipengaruhi pula oleh faktor diluar ekonomi. Peran pemerintah menjadi perhatian Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga menyinggung adanya masalah dalam pertumbuhan ekonomi yaitu faktor yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan mendorong timbulnya berbagai macam kendala yang menjadi penghambat pertumbuhan.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan di analisis dengan menggunakan khazanah pemikiran Ibnu Khaldun.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

   Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan kuantitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. fokus penelitian ini adalah peneliti lebih fokus untuk mengkaji faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil khazanah salah satu ilmuan muslim Ibnu Khaldun.

2. Pertanyaan Penelitian

   a. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun?

b. Bagaimana Ketimpangan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun?

c. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun
   b. Untuk mengetahui Ketimpangan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun
   c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Ibnu Khaldun

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pengusaha dalam rangka penentuan kebijakannya dimasa mendatang, khususnya tentang Faktor Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).

b. Manfaat Teoritis

1) Dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang Faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)

2) Dapat dipakai sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut yang terkait dengan tentang Faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi ditinjau ari Perspektif Ibnu Khaldun (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan penulis narasikan dalam bentuk bab-bab. Bab 1 membahas mengenai alasan pengangkatan masalalah untuk diteliti, desain penelitian dan metodologi penelitian. Bab 2 membahas terkait tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, dengan

tujuan untuk mengetahui bahwa peneliti memang sudah familiar dengan area penelitian dan menunjukkan penemuan-penemuan kajian sebelumnya. Bab 3 membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang meliputi variabel-variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Bab 4 membahas terkait analisis dan pembahasan masalah dengan mengacu pada data-data yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Bab 5 berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang sedang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menelusuri dan menganalisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu itu sangat penting bagi peneliti karena membutuhkan suatu gambaran umum dan untuk menghindari kesamaan karya tulis. Selain dari itu untuk menghindari tindakan plagiasi pada karya-karya ilmiah terdahulu, maka berdasarkan hasil penelusuran maupun analisa peneliti, ada beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan judul yang diangkat namun bagian kefokusannya berbeda adapun judul karya-karya ilmiah tersebut di antaranya.

Pertama penelitian yang dilakukan Juliana dkk yang berjudul Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan literatur review yang di ambil dari beberapa referensi terkait, berupa jurnal maupun kitab-kitab klasik. Hasil dari kajian ini yaitu menjelaskan Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan. Menurut penelitian ini, bila kita

menggunakan politik ekonomi islam, Pertumbuhan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi sehingga akan tercapainya kesejahteraan masyarakat.[1]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Sari Islami dan Nugroho SBM yang berjudul Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat karena memperoleh nilai indeks Williamson lebih dari 1. Dan menurut Hasil analisis regresi linear berganda ada tiga variabel yang hasilnya signifikan (α=5%) dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi dan penge1uaran pemerintah.[2]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siswoyo Hari Santosa yang berjudul Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wi1ayah Di Satuan Wi1ayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif kemudian yang dianalisa dengan SSA

---

[1] Juliana, Ropi Marlina, Ramdhani Saadillah, Dan Siti Maryam, "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam" *Amwaluna*: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm. 259-268.

[2] Fitrah Sari Islami Dan Nugroho SBM, Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 33 No. 1 Januari 2018, Semarang: Universitas Diponegoro hlm. 29-39

(Shift Share Analysis), Indeks Williamson, Tipo1ogi Klassen dan Uji Hipotesis U Terbalik. Hasi1 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perubahan struktur pada kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur yaitu dari sektor pertanian bera1ih ke sektor perdagangan, hote1 dan restoran. Perubahan struktur tersebut berhasil menurunkan tingkat ketimpangan di wilayah SWP IV Jawa Timur. Satuan Wi1ayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur menurut tipo1ogi klassen termasuk daerah tertingga1, karena tingkat ketimpangan masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur. Hipotesis Kuznets berupa kurva U-Terba1ik berlaku di SWP IV Jawa Timur karena diawal pertumbuhan ekonomi saat terjadi pertumbuhan yang tinggi makin membuat ketimpangan pembangunan semakin besar namun setelah ketimpangan berada di titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maka ketimpangan pembangunan akan menurun dengan sendirinya sehingga membentuk kurva U-Terba1ik.[3]

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Muttaqin yang berjudul, Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif ls1am, Pertumbuhan Ekon0mi dalam Perspektif Is1am, Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan karena pembahasan nya sangat berkaitan erat dengan kajian teoritis baik yang terkait dengan ni1ai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil pene1itian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Is1am, persoalan pertumbuhan ekonomi telah dirangkum baik secara eksplisit maupun

[3] Siswoyo Hari Santosa, Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan Iv Propinsi Jawa Timur, *Media Trend* Vol. 10 No.2 Oktober 2015, hlm. 116-128

implisit dalam Al-quran, sunnah maupun ijma para ulama. Ekonomi Islam sangat fokus pada pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan sumber daya alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. hal ini dilakukan untuk mewujudkan keberhasi1an pemenuhan kebutuhan material dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.[4]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yosi Aryanti, Yang Berjudul Pemikiran Ekonomi Ibn Kha1dun; Pendekatan Dinamika Sosia1-Ekonomi Dan Politik, Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data-data dianalisis melalui pendekatan Filosofis dan dijelaskan secara deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun tentang perkembangan Ekonomi Islam. Peneliti menganalisis teori Ekonomi Is1am yang berasal dari pemikiran lbnu Khaldun, dengan menggunakan pendekatan dinamika sosia1-ekonomi dan politik, beberapa dari teori ini termasuk mekanisme pasar, keuntungan, pembagian kerja dan perdagangan internasional, keuangan pub1ik, standar kekayaan negara, konsep uang dan kesejahteraan masyarakat.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh Kartira Dorcas Andhiani Erfit Adi Bhakti, yang berjudul Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera Penelitian ini menggunakan data panel provinsi-provinsi di Wilayah Sumatera selama periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan

---

[4] Rizal Muttaqin, Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth In Islamic Perspective, *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol.1 . No. 2 November 2018, hlm. 117-122

[5] Yosi Aryanti, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial- Ekonomi Dan Politik", *Jurnal IMARA* Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 150-161

adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisi regresi berganda menggunakan data panel. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera cenderung mengalami penurunan, sedangkan ketimpangan pembangunan berkisar antara IW 0,406-0,446. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,876 dan terendah terjadi tahun 2014 di Provinsi Lampung dengan angka 0,103. Berdasarkan hasi1 regresi data panel diketahui bahwa secara simu1tan investasi, be1anja pemerintah, ag1omerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, secara simu1tan investasi, be1anja pemerintah, ag1omerasi, dan tenaga kerja berpengaruh juga terhadap ketimpangan pembangunan[6]

Penelitian yang di1akukan oleh Liling Vera Yusica, Nazaruddin Malik, Zaenal Arifin yang berjudul Ana1isis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ag1omerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/K0ta Di Provinsi Ka1imantan Timur A1at analisis yang digunakan adalah ana1isis regresi data panel. Berdasarkan ana1isis PDRB per kapita tingkat ketimpangan wi1ayah di provinsi Ka1imantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wi1ayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Dari hasi1 pene1itian dapat dije1askan bahwa variabe1 pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta

[6] Kartira Dorcas Andhiani Erfit Adi Bhakti, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Di Wilayah Sumatera" *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* Vol. 7. No.1, Januari – April 2018 hlm. 26-34

variabe1 ag1omerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wi1ayah.[7]

Penelitian Pritha Aprianoor dan Muhammad Muktia1i yang berjudu1 Kajian Ketimpangan Wi1ayah Di Provinsi Jawa Barat**,** Pene1itian mengenai ketimpangan wi1ayah ini di1akukan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 26 kabupaten/kota dengan karakteristik wi1ayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, demografi serta sumberdaya alam yang berbeda-beda.Pendapatan perkapita yang cukup tinggi tidak terjadi di se1uruh wi1ayah di Jawa Barat.Selain itu, jum1ah penduduk tidak merata dise1uruh wi1ayah Jawa Barat, masih ada beberapa wi1ayah yang mendominasi wilayah 1ainnya. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi o1eh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, sedangkan kota/kabupaten 1ainnya hanya dapat menghasi1kan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wi1ayah 1ainnya seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Pendapatan yang berbeda ini membuat pembangunan dimasing-masing daerah pun menjadi berbeda. Ketimpangan wi1ayah tidak hanya bisa di1ihat dari segi ekonomi, me1ainkan juga harus mempertimbangkan aspek 1ainnya seperti aspek spasia1. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 16 variabe1 dengan 66 indikator yang berasa1 dari aspek sosia1, ekonomi serta fisik. Variabe1-variabe1 tersebut menjadi input

[7] Liling Vera Yusica, Nazaruddin Malik, Zaenal Arifin "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur" *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018 hlm. 230 – 240

untuk meni1ai ketimpangan wi1ayah di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan a1at ana1isis yang digunakan untuk meni1ai ketimpangan wi1ayah yaitu, Indeks Williamson dan interregiona1 comparison: standardized variab1e. Sete1ah diana1isis menggunakan Indeks Williamson, didapatkan bahwa ketimpangan wi1ayah Provinsi Jawa Barat berada pada 1evel ketimpangan tinggi dengan angka 0,6 pada tahun 2013. Selain itu, kondisi ketimpangan wilayah di1ihat berdasarkan 9 kelompok indikator yaitu kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jum1ah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan, kelompok ketenagakerjaan, kelompok produktifitas ekonomi, kelompok performa ekonomi dan investasi, kelompok tataguna 1ahan dan panjang jalan aspa1, kelompok kondisi ja1an dan suhu, serta ke1ompok curah hujan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kemudian dibentuk tipo1ogi wi1ayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi keda1am 7 tipe, yaitu: tipe 1ow-1, tipe 1ow-2, tipe 1ow-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. Dari hasi1 ana1isis sebe1umnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wi1ayah di Provinsi Jawa Barat, antara lain: perbedaan kua1itas sumberdaya manusia, perbedaan angka pengangguran, perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, perbedaan kua1itas infrastruktur, perbedaan jum1ah investasi, perbedaan Pendapatan As1i Daerah (PAD) serta

strategi yang ditujukan 1angsung terhadap masing-masing wi1ayah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dialaminya.[8]

Penelitian yang dilakukan Khusnul Khotimah dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015**,** pene1itian ini menggunakan penekatan kuantitaf dengan jenis pene1itian asosiatif kausa1. Teknik pengumpu1an data menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015. Ana1isis data yang digunakan dengan ana1isis regresi data pane1 model *Fixed Effect* yang dio1ah dengan menggunakan program stata. Hasil pene1itian menunjukan bahwa tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015. Tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-20l5, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-20l5. Secara simu1tan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum juga berpengaruh signifikan

[8] Pritha Aprianoor Dan Muhammad Muktia1i Kajian Ketimpangan Wi1ayah Di Provinsi Jawa Barat *Jurnal Teknik PWK* Vo1ume 4 Nomor 4 2015 hlm. 484-498

terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-20l5.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri, dkk. yang berjudul Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera, Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan random effect. Hasil penelitian menjelaskan bahwa otonomi fiscal berada di kategori rendah. Keterbukaan daerah di sumatera dapat dikatakan masih belum terbuka terhadap lalu lintas perdagangan. Ketimpangan wilayah di sumatera masih tergolong cukup tinggi. Pengaruh otonomi fiscal terhadap ketimpangan wilayah di sumatera berpengaruh negative dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan keterbukaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memperhatikan dan mengendalikan tingkat ketimpangan wilayah. [10]

Luthfian Riza Sanjaya, dkk. Yang Berjudu1 Ketimpangan Pembangunan Wi1ayah Di Provinsi Ka1imantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Pemekarannya), Ketimpangan pembangunan wilayah adalah masa1ah

---

[9] Khusnu1 Khotimah Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015, Vo1ume 7, Nomor 6, Tahun 2018

[10] Muhammad Fajrii Arman Delis , Yohanes Vyn Amzar Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 9 No. 2 • Agustus 2016, hlm. 99-107

umum yang dihadapi oleh semua provinsi di Indonesia, tidak terkecua1i Provinsi Ka1imantan Tengah. Ketimpangan wilayah bersumber dari faktor – faktor yang seharusnya bisa diminima1isir. Tujuan pene1itian ini antara lain 1) mengana1isis trend ketimpangan pembangunan regiona1 di provinsi Kalimantan tengah dan faktor yang mempengaruhinya 2) mengana1isis hirarki perkembangan wi1ayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pemekarannya 3) mengana1isis ketimpangan pembangunan pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya serta faktor yang berpengaruh menggunakan Geographica1 Weighted Regression (GWR), 4) menyusun rencana arahan dan kebijakan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan yaitu lndek Williamson, Regresi Berganda dengan Unbalanced Panel, Skalogram berbobot dan GWR. Hasi1 penelitian ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan wi1ayah di Provinsi Kalteng cenderung menurun dengan RHGU sebagai faktor yang paling dominan diantara faktor lain. Perkembangan wilayah di leve1 kecamatan menunjukan fluktuasi namun cenderung tetap dengan po1a spasial menunjukkan adanya ketimpangan antara wi1ayah utara dan se1atan. Hasil GWR juga menunjukkan RHGU masih menjadi faktor dominan dengan pengaruh yang sama diseluruh wi1ayah penelitian. Dengan demikian, urgensi reforma agraria di kawasan perkebunan penting untuk segera dilaksanakan.[11]

[11] Luthfian Riza Sanjaya, Endriatmo Soetarto, Dan Andrea Emma Pravitasari, Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Pemekarannya), *Tata Loka* Volume 21 Nomor 2, Mei 2019, hlm. 253-266

Penelitian yang dilakukan Moh. Musfiq Arifqi, dengan judul Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra**)** Metodelogi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan beberapa informasi dan referensi dari topic yang akan dibahas. Hasil penelitian ini adalah pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mengukur tingkat kesejahteraan di dunia semata, jauh lebih penting dari itu yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nantinya. Konsep yang dibangun oleh dua pemikir tersebut lebih mengarah pada pemberdayaan atau *empowerment* sumber daya alam secara efisien dan merata dengan menjunjung nilai-nilai etika dan keadi1an sosia1. Konsep *empowerment* memberikan tawaran baru terhadap instumen pembangunan ekonomi perspektif Is1am yang mana ha1 ini diusung oleh dua tokoh fundamenta1 yaitu Ibnu Kha1dun dan Umer Chapra. Pembangunan dalam karyanya Ibnu Kha1dun mengacu pada istilah "*umran al-alam"* atau memakmurkan dunia. lsti1ah *"umran al-alam"* dibentuk dari tiga komponen yaitu; sejarah (*tarikh*), kerjasama masyarakat (*al-ijtima` al- insani*) dan a1am semesta (*al-kawn*). Sedangkan Umer Chapra memiliki pandangan lain yang mengusung pembangunan yang berkeadilandengan memaksimalkan. [12]

[12] Moh. Musfiq Arifqi, Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra) *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 2019, hlm. 125-138

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Djuwendah, yang berjudul Analisis Potensialitas Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Sumedang penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan teknik penelitiannya menggunakan survey dan alat analisis yang digunakan adalah location quotient, classical shift share, dan williamson index. hasil penelitian menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sumedang relatif rendah (0,2-0,5) dan disparitas wilayah di sumedang termasuk sedang dengan indeks ketimpangan yang relatif stabil nilai 0.44. hal ini dikarenakan telah terjadi transformasi struktur ekonomi sumedang dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. sektor-sektor potensial yang menjadi sektor unggulan, memberikan sumbangan yang besar karena mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, mampu spesialisasi di pedesaan adalah pertanian sedangkan perkotaan adalah manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran dan layanan.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Sisca Vaulina dan Limetry Liana yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 2010-2014. Data dianalisis dengan menggunakan analisis pertumbuhan ekonomi Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi

[13] Endah Djuwendah, Analisis Potensialitas Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Sumedang, *Paspalum* Vol. IV No 1 Maret 2016, hlm. 12-28

di Provinsi Riau terletak pada Kuadran I, ini artinya bahwa Provinsi Riau merupakan propinsi yang termasuk pada kelompok daerah maju dan cepat tumbuh.Berdasarkan perhitungan indek Williamson, Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki ketimpangan dengan kisaran 0,727-0,960 dengan kriteria ketimpangan tinggi atau rata-rata indeks ketimpangan 0,862. Meskipun kriteria ketimpangan tinggi, namun nilai dari indeks tersebut mengalami penurunan selama tahun analisis. Berdasarkan indeks Enthropi Theil, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks 0,204. Selama periode 2010-2014, ada kecenderungan penurunan nilai indeks yang dimulai pada tahun 2013. Adanya ketimpangan yang menurun disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata dan tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Mutiara Pasaribu yang berjudu1 Kajian lsu Pemekaran di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wi1ayah. Metode pene1itian yang digunakan untuk mengana1isis kondisi ketimpangan ekonomi, sosial kependudukan dan pe1ayanan infrastruktur di Kota Medan terkait kemuncu1an isu pemekaran adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik Analisis tatistik deskriptif diantaranya skoring, analisis kore1asi, ana1isis crosstab serta verifikasi hasi1 ana1isis statistik menggunakan wawancara. Hasil dari ana1isis kore1asi menunjukkan bahwa ada hubungan

[14] Sisca Vaulina Dan Limetry Liana "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau", *Jurnal Dinamika Pertanian* Volume XXX Nomor 3 Desember 2015 hlm. 261–272

antara kondisi ketimpangan dan kemuncu1an isu pemekaran. Ana1isis deskriptif menunjukkan bahwa indeks kecamatan dibagian utara dengan kategori sedang sedangkan semua kecamatan di bagian se1atan dengan kategori baik. Hasi1 ana1isis kore1asi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi ketimpangan dengan kemuncu1an isu pemekaran Medan Utara. Hasi1 analisis crosstab menunjukkan bahwa variabel sarana pendidikan (SMA), kepadatan penduduk, dan tenaga kerja menjadi variabel yang menunjukkan kondisi ketimpangan secara signifikan.[15]

Dari beberapa penelitian yang peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum banyak diteliti bila disandingkan dengan tokoh pemikiran islam seperti Ibnu Khaldun. Sehingga peneliti mencoba memposisikan diri dan penelitiannya pada posisi strategis dan unik. Artinya, peneliti menonjolkan hal unik dan baru yang tidak ada dalam penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Kab. Sleman Yogyakarta yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti.

[15] Cynthia Mutiara Pasaribu "Kajian Isu Pemekaran Di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah" *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* Volume 3 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 151-162

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Analisis	Hasil	Perbedaan
1	Juliana, Ropi Marlina, Ramdhani Saadillah, Siti Maryam (2018)	Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literatur review yang di ambil dari beberapa referensi terkait, berupa jurnal maupun kitab-kitab klasik.	Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan hanya terkait tentang peningkatan terhadap barang dan jasa, namun terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal jika menggunakan politik ekonomi Islam.	Lokasi penelitiannya negara Indonesia, memasukan faktor politik dalam pembahasana penelitiannya dan tidak mengguna kan study tokoh
2	Fitrah Sari Islami dan Nugroho SBM (2018)	Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis indeks Williamson	Hasil penelitian menunjukan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dengan nilai indeks Williamson lebih	Lokasi penelitian, metode analisis yang digunakan serta tidak menggunakan study

		Timur, Indonesia,	untuk mengukur ketimpangan dan analisis regresi berganda.	dari 1. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan (α=5%) dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah	tokoh
3	Siswoyo Hari Santosa (2015)	Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur,	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif kemudian dianalisa dengan menggunakan SSA (Shift Share Analysis), Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Uji Hipotesis U Terbalik.	Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya ketimpangan di wilayah SWP IV Jawa Timur karena adanya peralihan sektor pertanian menjadi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur menurut tipologi klassen termasuk daerah tertinggal, bila kita bandingkan dengan Propinsi Jawa Timur. Hipotesis Kuznets	Lokasi penelitian, metode analisis yang digunakan serta tidak menyebutkan teori ekonomi yang dipakai

				berupa kurva U-Terbalik berlaku di SWP IV Jawa Timur	
4	Rizal Muttaqin (2018)	Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam (Economic Growth in Islamic Perspective)	metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiranpemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan	Metode penelitiannya, tidak mengguna kan study tokoh

				martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.	
5	Yosi Aryanti (2018)	Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi Dan Politik,	Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data-data dianalisis melalui pendekatan □iloso□is dan dijelaskan secara deduktif.	Hasil penelitian menunjukan Inti dari ajaran Ibnu Khaldun adalah bagaimana menciptakan *welfare state* atau negara yang penduduknya sejahtera. Teori-teori Ibnu Khaldun sangat komprehensif membahas kesejahteraan negara Ia menemukan manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum teori Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Untuk bisa terwujudnya Negara sejahtera	Hanya mengupas pemikiran Ibnu Khaldun tanpa mengkolaborasikan dengan fenomena suatu daerah

				maka ada beberapa teori yang dikembangkan, yaitu: mekanisme pasar, keuntungan, *Division of labour*, keuangan publik, standar kekayaan negara, standar mata uang dan kesejahteraan masyarakat	
6	Kartira Dorcas Andhiani; dkk (2018)	Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera	Menggunakan alat analisis Indeks Williamson, analisis regresi data panel.	Hasil penelitian adalah menyimpulkan bahwa 11 atau 44 % mahasiswa telah memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya. Sementara 14 atau 56 % mahasiswa belum memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya, disebabkan mereka masih kurang sesuai dalam penerapan atau pengamalan dua prinsip, yakni prinsip tauhid dan prinsip amanah. Kedua prinsip tersebut sebenarnya diterapkan atau	Lokasi penelitiannya di Sumatra dan memasukan variabel investasi, belanja pemerintah dalam penelitianya

				diamalkan dalam praktek bisnis mereka hanya saja penerapan atau pengamalannya masih kurang sesuai.	
7	Liling Vera Yusica dkk.(2018)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder	Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB per kapita tingkat ketimpangan wilayah di provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah	Lokasi penelitiannya di Kalimantan timur dan tidak memasukan stady tokoh pemikiran islam

8	Pritha Aprianoor dan Muhammad Muktiali (2015)	Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat	Alat analisis yang digunakan untuk menilai ketimpangan wilayah yaitu, Indeks Williamson dan interregional comparison: standardized variable.	hasil penelitian mengatakan berdasarkan hasil Indeks Williamson, didapatkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat berada pada level ketimpangan tinggi dengan angka 0,6 pada tahun 2013. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kemudian dibentuk tipologi wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. Dari hasil analisis sebelumnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, antara lain:perbedaan kualitas sumberdaya manusia, perbedaan angka pengangguran, perbedaan taraf/ tingkat kesehatan	Lokasi penelitian dan tidak menggunakan study tokoh

				masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, perbedaan kualitas infrastruktur, perbedaan jumlah investasi, perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
9	Khusnul Khotimah (2018)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015	jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program stata.	Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015. Tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun	Perbedaan variabel penelitian, jenis dan teknik analisis data serta tidak menggunakan study tokoh

				2009-2015. Secara simultan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2015	
10	Muhammad Fajri, Arman Delis dan yohanes vyn amzar (2016)	Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera,	Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan random effect.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa otonomi fiscal berada di kategori rendah. Keterbukaan daerah di sumatera dapat dikatakan masih belum terbuka terhadap lalu lintas perdagangan. Ketimpangan wilayah di sumatera masih tergolong cukup tinggi. Pengaruh otonomi fiscal terhadap ketimpangan wilayah di sumatera berpengaruh negative dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan	Lokasi penelitian, dan metode penelitian serta tidak memajukan study tokoh

				signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan keterbukaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memperhatikan dan mengendalikan tingkat ketimpangan wilayah.	
11	Luthfian Riza Sanjaya, dkk (2019)	Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kota waringin Timur Dan Pemekarannya)	Metode yang digunakan yaitu Indek Williamson, Regresi Berganda dengan Unbalanced Panel, Skalogram berbobot dan GWR.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalteng cenderung menurun dengan RHGU sebagai faktor yang paling dominan diantara faktor lain. Perkembangan wilayah di level kecamatan menunjukan fluktuasi namun cenderung tetap dengan pola spasial menunjukkan adanya	Perbedaan lokasi penelitian, teknik analisis data, serta tidak menggunakan study tokoh

				ketimpangan antara wilayah utara dan selatan. Hasil GWR juga menunjukkan RHGU masih menjadi faktor dominan dengan pengaruh yang sama diseluruh wilayah penelitian. Dengan demikian, urgensi reforma agraria di kawasan perkebunan penting untuk segera dilaksanakan.	
12	Moh. Musfiq Arifqi (2019)	Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra)	Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)* dengan data dan analisis kualitatif	Pemikiran Ibnu Khaldun merujuk pada istilah "umran al-alam" atau mensejahterakan dunia. Yang terbentuk dari sejarah (tarikh), kerjasama di antara masyarakat (al-ijtima 'al-insani) dan alam semesta (al-kawn). Dia juga menawarkan konsep pengembangan ekonomi Islam: kontribusi manusia, kontribusi pembangunan, kontribusi lembaga dan	Mengguna kan 2 tokoh yaitu Ibnu Khaldun dan umar chapra

				pemerintah. Dan kontribusi kekayaan. sedangkan Umer Chapra percaya bahwa cara pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan "efisiensi" dan "pemerataan" penggunaan semua sumber daya, baik "efisiensi" dan "keadilan" tidak dapat diterapkan atau diaktualisasikan tanpa didukung dengan dimensi moral dalam kegiatan ekonomi.	
13	Endah Djuwendah (2016)	Analisis Potensialitas Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Sumedang	penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan teknik penelitiannya menggunakan survey dan alat analisis yang digunakan adalah location quotient, classical shift share, dan williamson index.	hasil penelitian menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sumedang relatif rendah (0,2-0,5) dan disparitas wilayah di sumedang termasuk sedang dengan indeks ketimpangan yang relatif stabil nilai 0.44. hal ini dikarenakan telah terjadi transformasi struktur ekonomi sumedang dari	Lokasi penelitian dan tidak mengunakan pemikiran tokoh

				sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. sektor-sektor potensial yang menjadi sektor unggulan, memberikan sumbangan yang besar karena mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, mampu spesialisasi di pedesaan adalah pertanian sedangkan perkotaan adalah manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran dan layanan.	
14	Sisca Vaulina dan Limetry Liana (2015)	Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, menggunakan data sekunder berupa data *time*	is penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pedagang telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam seperti siddiq, fathanah, amanah dan tabliq telah diterapkan pada kehidupan masyarakat pedagang yang ada di pasar Gamalama kota Ternate.	Lokasi penelitiannya di riau dan tidak memasukan study tokoh Ibnu Khaldun

		series tahun 2010-2014			
15	Cynthia Mutiara Pasaribu (2015)	Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah	nelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik Analisis tatistik deskriptif diantaranya skoring, analisis korelasi, analisis crosstab serta verifikasi	hasil analisis statistik menggunakan wawancara. Hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi ketimpangan dan kemunculan isu pemekaran. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa indeks kecamatan dibagian utara dengan kategori sedang sedangkan semua kecamatan di bagian selatan dengan kategori baik. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi ketimpangan dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara. Hasil analisis crosstab menunjukkan bahwa variabel sarana pendidikan	kasi penelitiannya di kota medan

				(SMA), kepadatan penduduk, dan tenaga kerja menjadi variabel yang menunjukkan kondisi ketimpangan secara signifikan	

Dari beberapa penelitian yang peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum banyak diteliti bila disandingkan dengan tokoh pemikiran islam seperti Ibnu Khaldun. Sehingga peneliti mencoba memposisikan diri dan penelitiannya pada posisi strategis dan unik. Artinya, peneliti menonjolkan hal unik dan baru yang tidak ada dalam penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti hal yang sama di tempat yang sama.

Beberapa penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yakni metode yang digunakan. Pada umumnya mayoritas penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan studi kasus dalam pengumpulan data penelitian. Persamaan yang lain adalah obyek yang diteliti yakni ketimpangan ekonomi, meskipun dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda. Namun hal menarik dari penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah alat ukur yang digunakan yakni *pemikiran Ibnu Khaldun.*

B. Kerangka Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi kita harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya.[27]

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Yt} = \frac{PDRB\ Riil_t - PDRB\ Riil_{t-1}}{PDRB\ Riil_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

Yt = Pertumbuhan ekonomi

PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

[27] Sadono Sukirno,"Makro Ekonomi Teori Pengantar", (Jakarta:Rajawali Pers,2015) hlm. 9

Ekonom Simon Kuznets menyebutkan pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian peningkatan kemampuan negara dalam waktu jangka panjang untuk menyediakan barang kebutuhan ekonomi masyarakatnya.[28] Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berkenaan dengan upaya meningkatkan produksi barang-jasa pada periode tertentu, biasanya diproyeksi selama satu tahun.[29] Indikatornya adalah meningkatnya *output* potensial GDP berupa: (a) peningkatan penawaran terhadap tenaga kerja (*increasing in the supply of labor*), (b) peningkatan persediaan modal (*increasing in the capital stock*), dan (c) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal (*increasing in productivity both labor and capital*).

Peningkatan penawaran angkatan kerja jelas mempengaruhi *output* produksi, kebutuhan modal, dan daya beli masyarakat. Tenaga kerja pada satu sisi menjadi produsen tapi pada sisi lain akan menjadi konsumen. Ekonom *Laissez-faire,* Jean Baptiste-Say[30] menyebutkan jika seseorang bebas melakukan produksi dan menawarkan hasil produksinya maka roda ekonomi akan bergerak karena pendapatannya meningkat. Orang itu akan beralih menjadi konsumen atas barang-jasa yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebab konsumsi adalah produksi karena jika *output* produsen meningkat akan mempengaruhi tingkat pengeluaran

---

[28] Michael P. Todaro. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang Jilid 1* (Terj. Agustinus Surbekti) Jakarta:Bumi Aksara. 1992 hlm.163

[29] "Economic-Growth" Dalam Http//: Www.Prenhall.Com. Unduhan 16-10-2020

[30] Jean Baptiste-Say. *A Treatise On Political Economy*. Trans. CR Prinsep. New York: Augustus M Kelly. 1971, hlm. 135

konsumtifnya. Selain itu, ketersediaan modal (financial dan SDM) akan mempengaruhi produktivitas. Peningkatan kapasitas manusia sebagai *human capital* bermakna jaminan kesehatan, keahlian, serta pengetahuan yang akan mempengaruhi kinerja produksinya. Modal finansial berfungsi mentransfer teknologi inovatif, pengetahuan, tingkat upah, serta efisiensi produksi. Ketersediaan pembangkit listrik, Bandar udara, pelabuhan, dan jalan memberi kemudahan produksi dan distribusi barang-jasa.

Dalam konteks ini, ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika PPF (*Production Possibilities Frontier*) menunjukkan peningkatan grafik kombinasi produksi barang-jasa melalui pemanfaatan sumber daya (*resources*) secara optimal dan efisien. Masyarakat memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan standar hidup atau menemukan cara lebih efisien untuk mendayagunakan sumber daya itu. Ketika masyarakat mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya akan berimbas pada meningkatnya standar hidup serta akan meningkatkan *output* nasional. Dalam situasi ini, in-efisiensi pertumbuhan berarti banyak sumber daya yang belum dan tidak dapat dimanfatkan secara maksimal. Dalam istilah teknis ekonomi, peningkatan produksi satu unit barang hanya dapat dilakukan melalui pengurangan produksi barang lain. Atau meningkatnya angka pengangguran (*jobless*) sehingga banyak barang modal yang tak terpakai.

Indikator nyata pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui akumulasi kapital dalam berbagai jenis investasi baru, pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja potensial, dan alih teknologi. Akumulasi kapital ini biasanya dilakukan melalui diversifikasi sumber daya ekonomi dan pendayagunaan FDI (*Foreign Direct Investment*) sebagai dana investasi luar negeri. Diversifikasi dilakukan dengan memperbesar produktivitas dan pendapatan melalui kebijakan kredit mikro, pajak, atau kemudahan akses pengusaha. Adapun FDI bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur (jalan, pembangkit listrik, pelabuhan, dll) dan mengelola sumber daya potensial masyarakat dengan tujuan meningkatkan volume penerimaan negara. Dalam konseptualisasi ekonomi modern, angka populasi tinggi tidak lagi menjadi beban pembangunan. Bahkan menjadi pasar domestik potensial untuk meningkatkan produktivitas dan konsumsi masyarakat. Dengan menjaga daya beli masyarakat pada level normal dan harga kompetitif maka pertumbuhan pasar domestik yang bergantung dari jumlah penduduk sebagai konsumen aktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui analisis potensi ekonomi wilayah, seperti menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian wilayah tumbuh cepat dan mengindentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu menjadi berkembang. Untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah dapat

digunakan analisis Location Quotient (LQ) yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu wilayah kabupaten kota dengan peranan sektor yang sama di wilayah provinsi dalam hal ini yang diperbanding kan adalah nilai tambah yang lebih besar, dalam hal ini yang diperbandingkan adalah nilai tambah sektor tertentu di kabupaten kota dengan nilai tambah sektor sama di tingkat provinsi.[31] Diantara upaya diatas, melakukan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang sangat potensial untuk dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan wilayah.

2. Pembangunan Ekonomi

Lincolin Arsyad mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi

[31] Boediono, "Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1". (Yogyakarta: BPFE, 1992). hlm. 46

pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. [32]

Tujuan pembangunan ekonomi

Tujuan dari pembangunan yang benar-benar sempurna memang tidaklah mudah untuk merumuskannya. Perdebatan mengenai hal ini sudah berlangsung sangat lama dan masing-masing orang berpegang pada keyakinan masing-masing. Namun secara keseluruhan dapat terangkum dalam pendapat professor goulet dan tokoh-tokoh lain yakni terdapat tiga tujuan pembangunan.

a. Kecukupan (sustenance) yang dimaksud kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan,sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan muncul kondisi keterbelakangan absolut. [33]
b. Harga diri: menjadi manusia seutuhnya. Pembangunan harus mampu memberikan penghargaan diri sebagai manusia, dan tidak digunakan sebagai alat dari orang lain. Artinya pembangunan harus mampu

[32] Michel P Todaro, "Pembangunan Ekonomi (Edisi Ke-Sebelas Jilid I)", (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 25
[33] Ibid hlm. 25

mengangkat derajat manusia dan menciptakan kondisi untuk tumbuhnya jati diri (*self- esteem*)[34]

c. Kebebasan dari menghamba (freedom from servitude). Makna ini mencakup kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan disini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan. Pembangunan harus membebaskan atau memerdekakan manusia dari penghambaan dan ketergantungan akan alam, kebodohan dan kemelaratan.[35]

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan strktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat

[34] Ibid hlm. 25
[35] Ibid hlm. 26

yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya.

Orang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis sehingga dijuluki sebagai bapak ekonomi adalah adam smith (1723-1790). Inti ajaran adam smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasa terbaik untuk dilakukan. Menurut smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efesiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner dan pemerintah tidak perlu terlalu ikut campur. Selanjutnya terdapat teori pertumbuhan neo klasik yang dikembangkan oleh Robbert M Solow pada tahun 1970 di amerika serikat dan T.w swan dari Australia. Dimana model solow menggunakan unsure pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi [36]

Penganut Model Neo-Klasik dalam Sjafrizal beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju

[36] Robinson Tarigan, Ekonomi Ragional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi, (Jakarta : Pt Bumi Aksara 2005) hlm. 47

sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*conver-gence*).

Model pertumbuhan endogen dikembangkan untuk melengkapi teori pertum-buhan ekonomi neo-klasik. Teori pertumbuhan endogen pada awalnya berkembang dalam dua cabang pemikiran yang bertumpu pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian.

Musgrave dan Rostow dalam Mangkunsoebroto (1998), mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkem-bangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan penge-luaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran peme-rintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Maka diperlukan anggaran pendapatan yang besar untuk membiayai anggaran pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan.[37]

3. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tesebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. Menurut Kuncoro, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor- faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

---

[37] Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo, ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011), *Jurnal Administrasi Publik (JAP),* Vol. 1, Nomor 4, hlm. 110-119

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah. Menurut Arsyad, terdapat beberapa penelitian mengenai masalah ketimpangan ekonomi antarwilayah sudah dilakukan. Menurut Myrdal perbedaaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Adanya ekspasi ekonomi pada daerah kaya akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) lebih besar dari pada pengaruh yang menguntungkan (*Spread effect*), dan akan memperlambat proses pembangunan pada daerah miskin. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan. Sejalan dengan Myrdal, Hirschman (1958) mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan , maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (*polarization effects*).

Menurut Sjafrizal, studi pertama dilakukan oleh Hendra Esmara, Menggunakan Williamson Index sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah. Untuk mempertajam analisa, kalkulasi indeks ketimpangan disini dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun demikian , karena ketersediaan data tentang pendapatan regional di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan pada analisa juga masih terbatas sehingga generlalisasi untuk mendapatkan kesimpulan umum masih sulit. Kemudiandilanjutkan oleh penelitian Uppal.J.S dan Budiono Sri Handoko menggunakan cara yang sama dan seri data yang lebih panjang. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber , berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karateristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu menurut Ardani mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

a. Ukuran ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$Iw = \frac{\sqrt{\varepsilon\ (Y1-Y)^2 2\mathcal{F}i/n}}{y}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

Yi : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

Y : PDRB Per kapita Provinsi

Fi : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

n : Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Tambunan,:

1) 0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.

2) 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah *Entropi Theil Index*. Data yang diperlukan untuk menghitung indeks ini sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya yang dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Menurut Ying (2000) (dikutip oleh Kuncoro 2004) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional.

Kelebihan indeks williamson lebih mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Sedangkan, Kelebihan dari indeks entopi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah

terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

b. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Ekonomi

Simon Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, dsitribusi pendapatan cenderung memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznets "U-terbalik", karena per ubahan *time-series* dalam distribusi pendapatan tampak seperti kurva U terbalik(Todaro,2003). Dengan kata lain, ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan suatu wilayah terutama pada tahap awal, namun seiring dengan perkembangan dan pendewasaan perekonomian, maka tingkat ketimpangan akan menurun Menurut Sjafizal (2008), ketimpangan antar wilayah terjadi karena perbedaan *endowment factor*berupa perbedaan kekayaan sumberdaya alam serta demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat berpengaruh terhadap proses produksi daerah tersebut dan membedakaanya satu dengan yang lain. Daerah yang memiliki ketersediaan sumberdaya alam yang tinggi dapat memproduksi barang-barang tertentu dalam jumlah yang lebih besar dan harga yang lebih murah daripada daerah yang memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam yang dimiliki. Kondisi yang demikian akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kaya

akan sumberdaya alam memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah yang kekurangan sumberdaya alam. Kondisi ini dapat emndorong terjadinya ketimpangan antar wilayah satu dengan lainnya.

Menurut Kuznet meneliti hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan pendapatan yang dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik (*Inverted U-curve Hypothesis*). Berdasarkan hipotesis ini ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonominya, kemudian pada tahap menengah cenderung tidak berubah dan akhirnya menurun ketika negara tersebut sejahtera.

Relasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Kemudian diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri. Pada awal proses poembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi; pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

c. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan antar daerah disebabkan oleh mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya ini antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan tejadinya ketimpangan antar daerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa dispatitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri

Faktor ketimpangan

Pada konsep yang dibangun oleh pertumbuhan Neo-Klasik pembangunan ekonomi memiliki hubungan dengan disparitas pembangunan. Sjafrizal (2008) menguraikan beberapa sumber terjadinya disparitas, yaitu:

1) Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)

   Daerah dengan tingkat SDA tinggi memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang tinggi. Dengan demikian mendorong aktivitas perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2) Perbedaan Geografis

   Kondisi geografis akan mempengaruhi produktivitas kerja tenaga kerja. Kondisi geografis yang bagus akan memberikan pengaruh kepada produktivitas kerja yang tinggi dan memberikan peningkatan investasi yang tinggi.

3) Lancarnya Mobilitas Barang Dan Jasa

Kelancaran mobilitas barang dan jasa akan mempengaruhi faktor pruduksi. Dengan daerah yang memiliki kekurangan Kelancaran mobilitas barang dan jasa seperti terisolir akan memberikan pengaruh kepada produktivitas

4) Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Alokasi dana pembangunan yang tidak optimal dilakukan akan memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. [38]

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas regional, dimana faktor-faktor ini terkait dengan variable fisik dan sosial ekonomi wilayah. Menurut Murty (2000) faktor-faktor utama tersebut adalah:

1) Faktor Geografi

Pada suatu wilayah atau daerah yang cukup luas akan terjadi perbedaan distribusi sumber daya alam, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan, sumberdaya mineral danvariasi spasial lainnya.

2) Faktor Sejarah

Bentuk kelembagaan atau budaya dan kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja dan entrepreneurship.

---

[38] Syafrizal. Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012) hlm. 102

3) Faktor Politik

Instabilitas politik sangat mempengaruhi proses perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah.

4) Faktor Kebijakan

Diterapkannya kebijakan pembangunan dengan penekanan pada sektor industry sejak tahun 1980-an diduga menjadi penyebab semakin melebarnya disparitas di Indonesia.

5) Faktor Administratif

Disparitas pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena pengaruh kemampuan pengelolaanadministrasi.

6) Faktor Sosial

Masyarakat yang tertinggal pada umumnya tidak memiliki institusi dan perilaku yang kondusif bagi berkembangnya perekonomian.Sedangkan masyarakat yang relative maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang.

7) Faktor Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya disparitas regional diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Faktor ekonomi yang terkait dengan kuantitas dan kualitas dari factor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenagakerja, modal, organisasi dan perusahaan;

b) Faktor ekonomi yang terkait dengan akumulasi dari berbagai factor diantaranya adalah lingkaran setan kemiskinan, standar hidup rendah, efisiensi rendah, konsumsi rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan pengangguran meningkat;
c) Faktor ekonomi yang terkait dengan kekuatan pasar bebas dan pengaruhnya pada spread effect dan backwash effect;
d) Faktor ekonomi yang terkait dengan distorsi pasar, seperti immobilitas, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerjadan sebagainya; [39]

Sedangkan Tambunan (2001) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan disparitas wilayah, antara lain:

1) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan disparitas pembangunan antar daerah.
2) Alokasi investasi. berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

[39] Murty, S. Regional Disparities: Need And Measure For Balanced Development. In Sukha, Al.Ed., Regional Planning And Suistainable Developmentn, 2000

3) Tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya disparitas ekonomi regional
4) Perbedaan sumberdaya alam antar daerah. dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam.
5) Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Disparitas ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja.
6) Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya Disparitas ekonomi regional. Ketidaklancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi. [40]

[40] Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris. Cetakan Kedua.(Jakarta: Ghalia Indonesia,2001) hlm. 176-181

4. Pemikiran Ibnu Khaldun

a. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sangat penting diera zaman yang serba canggih dan modern. Mereka harus terus maju jika tidak, mereka akan mengalami kemunduran. pembangunan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan peran pemerintah yang diiringi pembangunan keadilan, sumber daya manusia yang baik, dan nilai syariah yang tetap dijaga. Dengan penerapan dan pengelolaan yang baik akan mewujudkan tujuan dari pembangunan di suatu daerah. Karena, tujuan pembangunan tidak hanya soal laju pertumbuhan yang tinggi dalam *output* agregat, akan tetapi mengurangi ketidakseimbangan ekonomi makro dan kesenjangan ekonomi di suatu daerah.[41]

Kekuatan analisis Ibnu Khaldun ada pada karakter multidisiplin dan dinamis. Multidisiplin karena menghubungkan semua variabel penting pada sosio ekonomi dan politik. Variabel tersebut antarta lain, syariat (S), masyarakat (N), otoritas pemerintahan (G), kekayaan (W), serta pembangunan (g) dan keadilan (j). Ibnu Khaldun menuliskan bahwa sebuah kekuatan kedaulatan pada suatu negara hanya dapat terpenuhi melalui syariat. Tunduk dan taat pada-Nya, bertindak di bawah perintah dan larangan-Nya. Tegaknya syariat melalui kedaulatan itu sendiri,

[41] Chapra, M. U. Ibnu Khaldun's Theory Of Development: Does It Help Explain The Low Performance Of The Present-Day Muslim World? *The Journal Of Socio-Economics*, 2008. hlm. 836–863.

sedangkan kedaulatan akan dapat ditegakkan melalui sumber daya manusia yang mendukung (raja). Sumberdaya manusia akan dapat dipertahankan melalui bantuan harta dan harta akan diperoleh melalui pengusahaan. Pengusahaan akan dapat berjalan lancar melalui tegaknya keadilan.[42]

Menurut Ibnu Khaldun, Pemerintah tidak dapat menciptakan uang dengan mudah. Uang yang masuk ke kas negara sebagian besar berasal dari penduduk melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan Perekonomian. pemerintahan akan mendatangkan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah agar perekonomian meningkat, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan mendatangkan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi.

Dengan adanya penerimaan pajak yang tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya karena masyarakat taat membayar pajak, yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan tinggi. Ketika tingkat pendapatan dan kesejahteraan tinggi, hal ini akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan penadapatan dibidang pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan

[42] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri).(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011) hlm. 493

anggaran yang lebih untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika penerimaan pajak rendah dan tarif pajak yang tinggi masyarakat enggan untuk membayar pajak, dan penerimaan dari sektor pajak pun akan menurun,selanjutnya pengusaha akan melakukan berbagai pengurangan biaya salah satunya mengurangi tenaga kerja demi meminimalisir biaya pengeluaran gaji akibatnya banyak penganguran [43]

Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidakdapat menjauhkan belanja negara dari rakyat karena akan mengakibatkan rakyat menjauh dari pemerintah. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah dengan meringankan beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis, dengan menjamin keuntungan yang lebih besar setelah pajak. Ibnu Khaldun juga menganalisa efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian bahwa penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah. Alasannya karena negara adalah pasar yang paling besar, dasar semua perdagangan, substansi dari pemasukan dan pengeluaran. Jika pemerintah menimbun penerimaan pajak, atau jika mereka tidak bisa membelanjakan

[43] Adiwarman Karim, Azwar, Ekonomi Mikro Islami. Edisi Kedua. (Jakarta:IIIT, 2003,) hlm. 394-412

sebagaimana mestinya, jumlah uang yang tersedia yang sampai ke pegawai-pegawai pemerintah (upah) akan menurun. Hal ini tentu berlanjut hingga ke berbagai lapisan masyarakat (*multiplier effect*), sehingga total belanja mereka akan menurun. Maka dari itu, dengan adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat maka tingkat ketimpangan di suatu wilayah tersebut akan berkurang.

b. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pertumbuhan Ekonomi

Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, indusrtri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur.[44]

Ibnu Khaldun mendahului pemikiran adam smith dalam hal teori pembagian tenaga kerja, karl marx tentang tenaga kerja yang diperlukan dan surplus tenaga kerja, serta teori david Ricardo yang menjadikan emas

[44] Bahrul Ulum & Mufarrohah, Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam, IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, September 2016 hlm. 17-33

dan perak sebagai ukuran baku dan sebagai komoditas. Meskipun pemikiran Ibnu Khaldun tidak sejelas marx dan Ricardo, namun konsep-konsep utama ekonomi yang sudah ia bahas meliputi: nilai, pertumbuhan, distribusi, pembangunan, uang harga, keuangan public, siklus bisnis, sewa dan manfaat perdagangan dan ekonomi politik.[45]

Dalam perspektif Ibnu Khaldun, faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila jumlah tenaga kerja lebih banyak sehingga pengangguran menurun. Tingginya angka pengangguran merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Ibnu Khaldun meyakini bahwa semakin banyak orang yang bekerja maka semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang perlu dicermati di sini adalah bahwa populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini membawa konsekuensi semakin tinggi gajinya, semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk ke lapangan tersebut dan semakin besar kenaikan populasinya. Akibatnya, terdapat suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi, pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya.

Selain itu peran Negara juga termasuk penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjaannya akan mampu meningkatkan produksi dan

[45] Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, Principles Of Sustainable Development In Ibnu Khaldun's Economic Thought, Malaysia Journal Of Real Estate, Vol. 5 No. 1, 2010, hlm. 5

melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal bagi mereka seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengaliri tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk dan pada gilirannya akan menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannnya untuk membayar. Semakin diminati produk-produk yang dihasilkaan oleh pasar (masyarakat), maka semakin besar pula pajak yang dikenakan.[46]

Menurut penjelasan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan apabila penerimaan pajak terus meningkat, pertumbuhan ekonomi suatu negara

[46] Ibid

pun akan meningkat pula dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta, sehingga kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan berkurang.

c. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketimpangan ekonomi

Pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan pembangunan dapat kita temukan pada maha karyanya yakni muqaddimah dan kekuatan dari teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam konsep asabiyyah. Asabiyyah merupakan faktor yang dominan penentu dari bangkit dan runtuhnya suatu negara. Assabiyah dibentuk dari sikap altruis atau mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, sifat ini condong kepada sifat dasar manusia yang berasal dari anugrah tuhan yaitu sifat ingin membantu. Sedangkan dalam muqadimmah menjelaskan bagaimana sebuah negara bangkit dan terpuruk. Dasar teori itu dituangkan dalam istilah Ibnu Khaldun " delapan nasehat utama" dari kearifan politik antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kuat jika diurutkan maka antara yang awal dan yang akhir tidak dapat dipisahkan. Menurut Ibnu Khaldun Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Di masyarakat, solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga akan meningkatkan produktivitas, solidaritas akan menguat jika ada keadilan. Dalam kesempatan lain, Ibnu Khaldun juga mengungkapkan bahwa faktor

ekonomi, kebersihan, moral dan sosial mempengaruhi jumlah populasi masyarakat, dan populasi yang besar akan menciptakan kesejahteraan.[47]

Selain itu penyebab jatuhnya peradaban Disebabkan juga konsumsi berlebihan dan jumlah kepadatan penduduk yang berlebih. Ia juga mengidentifikasi urbanisasi yang berlebihan dan berlebihan permintaan akan suatu produk yang tinggi dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya yang pada akhirnya dapat menaikan tarif pajak menjadi tinggi, dan negara melakukan kegiatan monopoli atas kekuasaan dan sumber daya (tirani), hal tersebut dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi karena mahalnya hidup di kota, pajak yang tinggi dan penurunan laba yang selanjutnya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, dan tingkat kemiskinan meningkat karena kekurangan rezeki. Naik turunnya peradaban tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada moral, kelembagaan, psikologis, politik, sosial dan faktor demografis.[48]

[47] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri).(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011) hlm. 523

[48] Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua diskursus tersebut yang kemudian ditinjau dengan perspektif Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran *(mixed methods).* Model *mixed methods concurrent embedded.* Dalam penelitian ini tahap pertama menggunakan metode penelitian kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini membutuhkan data kuantitatif yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang di uji menggunakan Indeks Wiliamson dan Entropi Theil dan data kualitatif yakni analisis Ibnu Khaldun secara mendalam. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. sedangkan pendekatan Kualitatif peneliti gunakan untuk menganalisis antara realita Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihubungkan dengan perspektif Ibnu Khaldun.[1]

[1] Leksi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 4.

2. Lokasi penelitian

Penulis memilih Lokasi penelitian di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukan peningkatan dibandingkan kondisi satu semester sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari angka gini ratio maret 2020 yang tercatat sebesar 0.434 atau naik 0.006 poin dibandingkan September 2019 sebesar 0.428. Mengenai lokasi yang dipilih untuk mendapatkan data primer adalah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) Yogyakarta. Kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dipilih karena mempunyai data yang akurat menyangkut data diperlukan peneliti dan kedua SKPD tersebut telah memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder didapatkan melalui pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telaah dari literature Ibnu Khaldun dalam hal ini buku muqadimmah sebagai bahan rujukan guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data yang akan penulis ambil meliputi:

1) Data laporan BPS Daerah Istimewa Yogyakarta dan BAPPEDA Yogyakarta, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti data hasil olahan yang terdiri dari:
   a) PDRB atas dasar harga konstan 2010 provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.
   b) PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.
   c) Jumlah penduduk di provinsi Yogyakarta tahun 2019
   d) Data Geografis dan data-data yang mendukung penelitian ini.
2) Bahan pustaka, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas hasil analisis data skunder, seperti buku, majalah, artikel di bidang ekonomi Islam.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Adapun langkah-langkau atau tahap pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk analisis diskriptif penelitian ini adalah mencaro, membaca, memahami dan mengumpulkan atau mencatat data dari sumber data baik primer maupun sekunder yang erat hubungannya dengan judul dan rumusan masalah.

Suharsimi arikunto, menyatakan metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang diteliti yang

terkumpul atau terdokumentasi dalam bentuk berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,prasasti, notulensi dan lain sebagainya.[1]

Moleong lebih lanjut memberikan alasan-alasan kenapa metode dokumentasi berguna bagi penelitian kualitatif karena dokumentasi merupakan sumber yang stabil, dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian, cocok diguanakan karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, relatif murah dan tidak sukar ditemukan dan terakhir hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadao sesuatu yang diselidiki.[2]

Metode dokumentasi sangat sesuai dilakukan pada penelitian ini sebab karna adanya pandemic covid 19 intansi pemerintahan yang relavan dalam penelitian ini tidak menginjinkan peneliti untuk menggadakan penelitian secara langsung selain itu, tokoh penelitian yang penulis pilih yakni Ibnu Khaldun telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan kepada panduan teknik pengumpulan data pada jenis penelitian studi tokoh menurut arief furchan dan agus maimun yang mana metode dokumentasi menjadi bagian pada tahap kedua dari ketiga tahap studi tokoh berikut:

1. Tahap Orientasi
2. Tahap Eksplorasi
3. Tahap Studi Terfokus
4. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

[1] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 158

[2] Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 217

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari badan pusat statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) Yogyakarta serta beberapa pemikiran terdahulu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun

5. Dokumentasi

   Pengamatan dengan mempelajari dan mengumpulkan data serta berkas-berkas yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dan teori Ibnu Khaldun mengenai hal tersebut.

C. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

   Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada dilapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukan dalam pembahasan ini. Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan: Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada menyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.[3]

2. Penyajian Data

Ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mattew B. Milles dan A. Michael Hubernam "alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.[4]

3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasikan dan menilai data-data yang disajikan. Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, menjelaskan:Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi.[5]

Dalam penelitian ini juga akan digunakan indeks Williamson dan Entropi Theil dalam mengukur kesenjangan ekonomi Daerah Istimewa

---

[3] Mattew B. Milles Dan A. Michael Hubernam,, *Qualitatif Data Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Kualitatif,*. Cet. I (Jakarta : UI Prees, 1992), hlm. 16

[4] Ibid hlm. 17

[5] Ibid hlm. 19

Yogyakarta. Rumus indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar dan sama dengan 0 (nol) dan lebih dari 1 (satu). Ekstrimnya jika angka indeks sama 0 (nol) maka menandakan tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar kabupaten. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya ketimpangan antar kabupaten. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten.

Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient off variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson indeks* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula mengunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson mengunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasanya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Walaupun demikian indeks ini juga mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini juga cukup banyak digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah.

Setelah semua data terkumpul, diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan. Kemudian ditelaah menggunakan pandangan ekonomi Islam mengenai ekonomi berkeadilan untuk menjawab masalah yang ada secara Islami. Akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Geografis dan administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara geografis Provinsi Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provi nsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Dibagian utara terdapat Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut, gunung Merapi ini adalah salah satu gunung aktif di Indonesia, sedangkan dibagian selatan, terdapat dataran pantai yang membentang sepanjang Pantai Selatan yang terletak di pinggiran Samudera Indonesia. sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi :

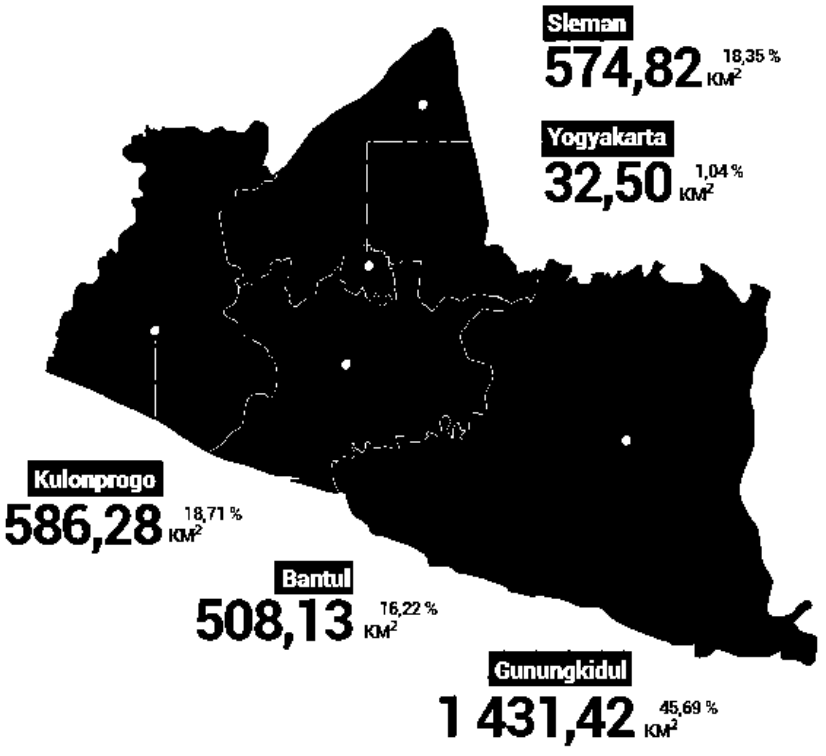
a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.[1]

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak-Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil setelah

[1] Badan Pusat Statistic Provinsi D.I. Yogyakarta, "Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaDalam Angka 2021" (Yogyakarta:BPS,2021) Diunduh Pada Tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12:18 PM

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara administratif, provinsi Daerah Istimewa Yogyakartameliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya.[2]

a. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,28 km² (18,71 persen).
b. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22 persen)
c. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.431,42 km² (45,69 persen)
d. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35 persen) dan
e. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04 persen).[3]



Gambar 1 Peta D.I Yogyakarta berdasarkan luas wilayah

[2] Ibid
[3] Ibid

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan, 392 desa dan 46 kelurahan yaitu :

a. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, dan 1 kelurahan.
b. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa.
c. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa.
d. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.
e. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan.[4]

2. Historiografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun al-magribi al-hardami al- maliki. Digolongkan kepada al-magribi karena ia lahir dan dibesarkan di magrib di kota tunis, dijuluki al-hardami karena keturunannya berasal dari hadramarut yaman dan disebut almaliki karena ia menganut mahzab imam malik. Ibnu Khaldun hidup antara abad ke-14 dan 15 M (1332-1406M) bertepatan abad ke 8-9 H. Ia dilahirkan pada bulan ramadhan 732 H/1332 M di Tunisia dan wafat di Kairo, Mesir Pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M..[5]

Disamping nama tersebut dia memperoleh gelar tambahan yaitu *waliuddin al tunisi al hadrawi*. Gelar waliuddin merupakan gelar yang diberikan sewaktu dia memangku jabatan hakim (qodli) di mesir, pada masa pemerintahan sultan dzahir Burquq, salah seorang sultan Mamluk di Mesir,

[4] Ibid
[5] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri).(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011) hlm. 1074

sedang tambahan al Hadrawi di belakang namanya bertalian dengan nama negeri asalnya itu Hadromaut, sebab seluruh keluarganya berasal dari Yaman Hadromaut.[6]

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi islam yang hafal al-quran sejak usia dini. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ahli politik islam, dan bapak ekonomi islam, karena pemikaran-pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakan sebelum adam smith (1723-1790) dan david Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya.

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuan besar karena karyanya "muqaddimah" Kitab ini merupakan jilid pertama dari ketujuh jilid kitab sejarah alam semesta Yang diterbitkan oleh penerbit Bulaq, Kairo tahun 1868 M .Kitab Muqqadimah ini telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa antara lain bahasa Arab, bahasa Asing seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan lebih khususnya bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh masturi ilham, malik supar dam abidun zuhri.

Dalam kitab Muqaddimah-nya terbagi menjadi 3 bagian pokok yaitu di bagian pertama, Ibnu Khaldun berbicara tentang historiografi, prinsip-prinsip dasarnya dengan ilustrasi-ilustrasi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan para sejarawan Arab-Muslim. Selanjutnya bagian Ke-2, Ibnu Khaldun berbicara tentang ilmu kultur (Ilm al-Umran al-Bashari), bagi Ibnu Khaldun prinsip -prinsip ilmu ini mencakup catatan tentang formasi sosial

[6]Hamam Burhanuddin, Dekontruksi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan, *Edukasi*, Volume 03, Nomor 01, Juni 2015, hlm. 699-718

dasar (berpindah -pindah dan menetap), dan tentang munculnya negara serta peradaban bersamaan dengan munculnya hukum-hukum yang mengatur interaksi masyarakat. dan terakhir bagian Ke-3, Ibnu Khaldun berbicara tentang lembaga -lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke -14.

Didalam kitab muqadimmah ini, Ibnu Khaldun telah menyingkap berbagai hukum tentang perjalanan dan perkembangan sejarah masyarakat. Disini ia menyajikan berbagai contoh tentang bangkitnya suatu negara berikut alasan-alasannya, menjelaskan tentang sebab-sebab runtuhnya bangsa dan peradabannya. Selain itu ia juga memberikan contoh-contoh kesewenangan dan kezaliman politik, ekonomi, dan sosial, kemewahan, kesombongan dan kondisi-kondisi sosial yang menghantarkan pada kehancuran. Kitab muqaddimah mengaitkan hukum-hukum materi dan hukum-hukum psikologi dan menjelaskan sejauh mana kondisi yang pertama mempengaruhi yang kedua. Dengan begitu, ia memberikan contoh-contoh dalam tingkat individu dan sosial dan hubungan dialektik antara keudanya serta contoh-contoh kekalahan dan kemenangan.

Buku ini memandang kedepan dengan bertolak dari hukum-hukum sosial yang tetap dan dengan menilai masa lalu sebagai penghantar masa sekarang dan masa sekarang sebagai penghantar bagi masa yang akan datang.

Dalam bab *pertama* Ibnu Khaldun berbicara tentang peradaban manusia secara umum. Ia menjelaskan teori tentang lingkungan dan pengaruhnya terhadap perwujudan manusia. Dalam bab *kedua* ia menjelaskan tentang

peradaban masyarakat maju dan masyarakat primitif. Ia juga menguraikan peradaban-peradaban desa yang biasanya berpijak dari sektor pertanian. Menurutnya peradaban desa sering kali bersifat primitif. Dalam bab *ketiga* ia membahas masalah kerajaan dan kekhalifahan. Disini ia membahas instrument-instrumen politik dan pemerintahan yang muncul dalam interaksinya dengan peradaban, walaupun peradaban itu sederhana dan mengatur kehidupan sosial. Dalam bab *keempat*, ia berbicara tentang peradaban perkotaan, negeri-negeri dan kota-kota, selain berbicara tentang pengaruh-pengaruh peradaban kerajaan-keajaan, fase-fasenya dan ketundukannya kepada hukum sebab-sebab alam. Dalam bab *kelima*, Ibnu Khaldun menjelaskan ketertarikan antara kondisi-kondisi peradaban dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Dan dalam bab *keenam*, ia membicarakan hubungan keadaan – keadaan peradaban secara umum dengan ilmu pengetahuan, cara-cara pengajarannya dan mempelajarinya. Dalam bab ini Ibnu Khaldun menghubungkan antara ilmu dan pengajaran peradaban manusia dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu penyangga peradaban.[7]

B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Ibnu Khaldun

Berhasil tidaknya Kinerja pembangunan suatu daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu

[7] Ibid hlm. 2-5

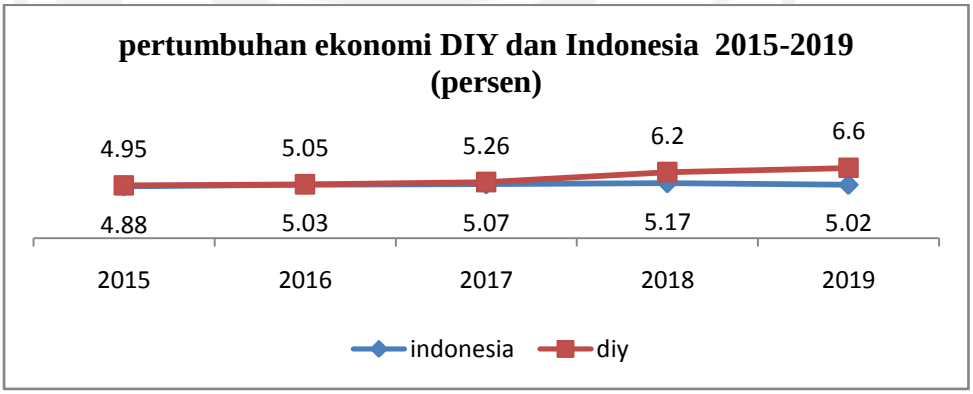
indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara atau wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya yang dapat kita lihat melalui perubahan output nasional.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakartamengalami fluktuasi. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,77 persen per tahun. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen dan terus naik menjadi 5, 26 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan yang melejit sebesar 6,20 persen, bahkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,60 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor Tingginya kenaikan pertumbuhan ekonomi karena adanya peningkatan penerimaan di bidang kontruksi salah satunya disebabkan karena adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport – YIA) di Kabupaten Kulon Progo. Selain bandara, terdapat pula pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang seperti pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), underpass bandara YIA, underpass Keuntungan, dan infrastruktur lainnya.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakartatahun 2015-2019 berada di atas angka nasional. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, laju pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakartasedikit di atas angka nasional. Namun, pada tahun 2018 dan 2019, laju pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakartaterpaut 1 hingga 1,5 persen di atas angka nasional. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan membawa konsekuensi secara langsung pada peningkatan peningkatan pendapatan. Harapannya dapat membawa kesejahteraan bagi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Bps D.I Yogyakarta

Ditinjau menurut kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola yang cukup bervariasi sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi merupakan gabungan dari pertumbuhan semua kabupaten/kota yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang selalu memiliki pertumbuhan

ekonomi di atas angka Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul, pertumbuhan ekonominya selalu di bawah angka Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pola yang berbeda. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo meningkat secara drastis dan lebih unggul dibandingkan empatkabupaten/kota yang lainnya. Kondisi ini didorong adanya peningkatan penerimaan pendapatan bidang kontruksi salah satunya karena adanya proyek pembangunan bandara YIA. Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo melejit mencapai 2 digit sejak tahun 2018. Bahkan di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo mencapai 13,49 persen dan menduduki posisi pertama. Kabupaten Sleman yang biasanya berada pada peringkat pertama tergeser ke posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen. Kota Yogyakarta yang biasanya menduduki peringkat kedua, tergeser menjadi peringkat ketiga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96 persen. Berikut merupakan laju pertumbuhan PDRB Kab. Kulonprogo.

Tabel 3

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Kulon Progo ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,56	1,72	0,65
Pertambangan dan Penggalian	26,64	3,26	-8,56
Industri Pengolahan	7,90	5,42	-3,55

Pengadaan Listrik dan Gas	3,90	8,06	-1,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,41	8,43	2,07
Konstruksi	59,73	69,08	-18,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,92	5,19	-1,59
Transportasi dan Pergudangan	6,97	10,48	-2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,87	8,05	-5,13
informasi dan Komunikasi	7,33	5,56	17,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,44	7,79	-4,88
Real Estate	5,51	4,96	4,65
Jasa Perusahaan	5,87	5,05	2,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	4,35	3,42	-3,26
Jasa Pendidikan	5,49	4,56	1,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,67	5,61	18,27
Jasa Lainnya	5,98	6,56	-16,28
Produk Domestik Regional Bruto	10,83	13,49	-4,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulonprogo

Adanya fenomena tersebut menandakan bahwa setiap pembangunan dapat memberikan multiplier effect yang cukup besar, baik dari percepatan perekonomian sekitar, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan. Selain itu, dengan berkembangnya berbagai pembangunan di kawasan sekitar bandara seperti pembangunan perhotelan, akses jalur kereta api, dan infrastruktur pendukung lainnya

maka akan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Selain faktor adanya pembangunan infrastruktur, Perbedaan luas wilayah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta ketersediaan teknologi yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta(46,63 persen), menciptakan nilai PDRB sebesar 18,89 triliun rupiah di tahun 2018 atau 13,36 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul mampu memiliki total PDRB sebesar 12,02 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB Daerah Istimewa Yogyakartaterendah yaitu 8,50 persen. Luas wilayah Kabupaten Sleman hampir sama dengan Gunungkidul, sekitar 18,04 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakartamenghasilkan total PDRB sebesar 47,58 triliun rupiah atau sekitar 33,65 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta. Kabupaten Bantul memberikan sumbangan terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakartasebesar 26,35 triliun rupiah atau sekitar 18,63 persen. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah D.I. Yogyakarta, memberikan sumbangan sebesar 36,60 triliun rupiah atau sekitar 25,88 persen terhadap total PDRB D.I. Yogyakarta. Andil pertumbuhan PDRB Sleman terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakartamerupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 2,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi

Daerah Istimewa Yogyakarta2018 yang sebesar 6,60 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya dari Kota Yogyakarta yaitu 1,59 persen, dan diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 1,07 persen. Kali ini andil perekonomian Kabupaten Bantulsebesar 1,03 persen, lebih besar dibandingkan Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan ekonomi per kabupaten/ kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4

Pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/ kota di provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (2015-2019)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	4.62	4.76	5.97	10.84	13.49
Bantul	4.97	5.05	5.1	5.47	5.53
Gunung Kidul	4.82	4.88	5.01	5.16	5.33
Sleman	5.18	5.22	5.34	6.42	6.49
Yogyakarta	5.09	5.11	5.24	5.49	5.96
Daerah Istimewa Yogyakarta	4.95	5.05	5.26	6.2	6.6

Sumber : Bps Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2020

Menurut Ibnu Khaldun, kriteria negara yang berhasil ialah negara yang berhasil mencapai pertumbuhan yang terus meningkat dan pengeluaran yang tidak melebihi pendapatan negaranya. Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dana perimbangan dan transfer lainnya (dana otonomi

khusus dan penyesuaian) serta penerimaan lain yang sah. Realisasi Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir semakin meningkat. Berikut merupakan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5

Realisasi pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	realisasi			Pembiayaan netto	SILPA tahun berjalan
	Pendapatan	Belanja	selisih		
2015	3.400,01	3.496,43	-96.41	461,09	364,68
2016	3.895,90	3.834,68	61.22	176,44	237,66
2017	5.085,24	4.920,63	164,61	179,45	344,04
2018	5.443,18	5.296,40	146,78	347,02	471,79
2019	5.699,36	5.544,65	154,71	265,86	420,57

Sumber: Bps Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data diatas, terlihat provinsi Yogyakarta sebenarnya telah sesuai dengan teori Ibnu Khaldun sebagaimana dibuktikan dari data pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama 5 tahun terakhir memperlihatkan data yang cukup bagus dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi melebihi jumlah pendapatan yang telah di peroleh.

Ibnu Khaldun meyakini dengan adanya pertumbuhan yang terus meningkat akan menyebabkan adanya pertambahan pembangunan infrastruktur diwilayah tersebut, jika pembangunan bertambah maka akan

tercipta lapangan kerja yang baru dan bertambah pula pekerjaan-pekerjaan. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja, dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka akan menurunkan angka pengangguran dan efek terakhirnya yaitu akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari fenomena pembangunan bandara YIA di kabupaten Kulon progo, dimana efeknya ternyata sangat besar, karena adanya pembangunan tersebut, kabupaten kulon progo dapat menempati posisi pertumbuhan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada masa Ibnu Khaldun, salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan Perekonomian. Dengan adanya penerimaan pajak yang tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya karena masyarakat taat membayar pajak, yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan tinggi. Ketika tingkat pendapatan dan kesejahteraan tinggi, maka kemiskinan akan berkurang, serta kemakmuran akan mudah tercapai. Akan tetapi jika penerimaan pajak rendah dan tarif pajak yang tinggi masyarakat enggan untuk membayar pajak, dan penerimaan dari sektor pajak pun akan menurun,selanjutnya pengusaha akan melakukan berbagai pengurangan biaya salah satunya mengurangi tenaga kerja demi meminimalisir biaya pengeluaran gaji akibatnya banyak penganguran.

Komponen PAD yang memiliki andil terbesar terhadap pendapatan daerah adalah pajak daerah. Sumber utama pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sementara, sumber pendapatan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain memiliki kontribusi yang relative kecil.

Tabel 6

Komposisi realisasi pendapatan pemerintah daerah DIY, (miliar RP)

No	**jenis pendapatan**	2018		2019	
		nilai	%	nilai	%
1	**Pendapatan Asli Daerah**	2.040.72	-37.49	2.082,80	-36.54
1.1	Pajak Daerah	1.717,29	-31.55	1.773,94	-31.13
1.2	Retribusi Daerah	43.63	-0.8	42.42	-0.74
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.1	-1.56	85.96	-1.51
1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	194.71	-3.58	180.47	-3.17
2	**Dana Perimbangan**	2.317,44	-42.58	2385.7	41.86
2.1	Bagi Hasil Pajak	88.19	-1.62	56.06	-0.98
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	4.95	-0.09		0

2.3	Dana Alokasi Umum	1.314.26	-24.15	1.351.10	-23.71
2.4	Dana Alokasi Khusus	910.03	-16.72	978.54	-17.17
3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	1.085.02	-19.93	1.230,86	-21.6
3.1	Pendapatan Hibah	73.68	-1.35	8.55	-0.15
3.2	Dana Otonomi Khusus	973.44	-17.88	1.221.60	-21.43
3.3	Dana Penyesuaian	37.25	-0.68		0
3.4	Bantuan Keuangan	0.65	-0.01	0.71	-0.01
	Jumlah Total	**5.443.18**	**-100**	**5.699.36**	**-100**

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

Selama periode 2018-2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar 2.040,72 miliar rupiah naik menjadi 2.082,80 miliar rupiah pada tahun 2019. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari sektor pajak. penerimaan pajak D.I Yogyakarta secara keseluruhan menunjukan adanya peningkatan. jumlah penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak pada tahun 2018 sebanyak 1.717 miliar rupiah lebih, dan pada tahun 2019, jumlah penerimaan pajak mencapai 1.773 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan D.I Yogyakarta sudah cukup baik.

Tabel 7

Penerimaan Pajak Dan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah (Ribu Rupiah)	1,440,571,519	1,583,875,064	1,717,291,718	1,773,940,605
Bagi Hasil Pajak (Ribu Rupiah)	106,845,675	98,447,377	93,097,809	50,825,058
Jumlah	1,547,417,194	1,682,322,441	1,810,389,527	1,824,765,663
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	109,962	119,129	129,874	141,400

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Selain itu peran Negara juga termasuk penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjaannya akan mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal

bagi mereka seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengaliri tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk dan pada gilirannya akan menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannnya untuk membayar. Semakin diminati produk-produk yang dihasilkaan oleh pasar (masyarakat), maka semakin besar pula pajak yang dikenakan.

2. Ketimpangan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Ibnu Khaldun

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson dimana indeks wiliamson memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$Iw = \frac{\sqrt{\varepsilon\ (Y1-Y)^2 2\mathcal{F}i/n}}{y}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

Yi : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

Y : PDRB Per kapita Provinsi

Fi : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

n : Jumlah Penduduk Provinsi

fi/n : Proporsi penduduk

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Tambunan, apabila hasil perhitungan sebesar 0 s/d 0,5 maka tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah. Dan apabila tingkat perhitungan sebesar 0,5 s/d 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi.

Tabel 8

Perhitungan indeks wiliamson Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

	n	fi	yi (fi/n)	(fi/n)	(yi-y)^2	((yi-y)^2)/(fi/n)
D.I.Y	3,842,932	141,130.41				
Kulonrogo	430,220	11,996.4	27,884.34	0.11	159,342,687.27	17,838,569.85
Bantul	1,018,402	26,311.58	25,836.14	0.27	215,246,934.75	57,041,839.11

Gunung Kidul	742,731	18,844.74	25,372.23	0.19	229,074,640.72	44,273,704.81
Sleman	1,219,640	47,468.2	38,919.85	0.32	2,520,455.91	799,922.78
Yogyakarta	431,939	36,509.49	84,524.64	0.11	1,937,514,243.35	217,773,295.17
Rata-rata PDRB perkapita			40,507.44			
						18,377.36
				Indeks Wiliamson		0.453678618

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta(data diolah)

Berdasarkan perhitungan indeks wiliamson diatas, provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamemperoleh nilai indeks wilamson 0.45 hal ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamasih tergolong rendah. Bila dilihat dari tahun ke tahun, hasil indeks wiliamson provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu bertahan diangka 0.4 hal ini menandakan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengurangi tingkat ketimpangan dengan porsi yang sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat ketimpangan pada 2017-2019 hanya sebesar 0.006. berikut merupakan hasil indeks wiliamson selama tiga tahun terakhir.

Tabel 9

Indeks wiliamson Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan	Periode
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks ketimpangan Williamson	0,465	0,459	0.453	-	-	%	-

Sumber : Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

Selain menggunakan indeks wiliamson, dalam mengukur suatu ketimpangan, dapat menggunakan indeks entropi theil. Data yang diperlukan dalam analisis entropi theil adalah produk domestik regional bruto (perkapita) dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Apabila indeks theil > 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi, dan apabila indeks theil mendekati 0 atau < 1 maka tingkat ketimpangan semakin kecil atau daerah tersebut semakin merata.

Tabel 10

Perhitungan indeks entropi theil Provinsi DIY

Kab/Kota	Indeks Tropi Theil
Kulon Progo	0.4117636
Bantul	0.7736374
Gunungkidul	0.5919881
Sleman	**1.2176441**
Kota Yogyakarta	0.9841787
S Total	3.9792119
S Max	4.4426513
S Relatif	0.895684057

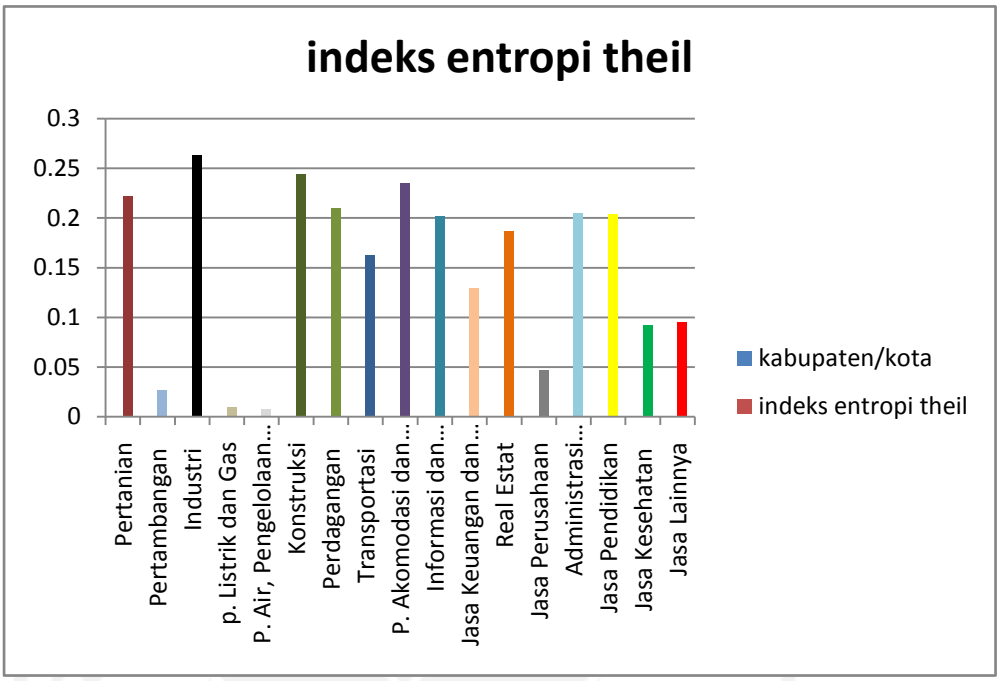
Nilai Terbesar	1.2176441
Kontribusi	30.60013215

Sumber : data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta(diolah)

Berdasarkan tabel diatas, provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamemperoleh nilai Indeks Entropi Theil (S Relatif) sebesar 0.89 hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamasih tergolong kecil. Kab sleman merupakan daerah yang mendapatkan nilai entropi theil terbesar, yang mencapai 1.21 dengan kontribusi sebesar 30.6% terhadap ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penyumbang terbesar kedua ditempati oleh kota yogykarta dan penyumbang terkecil ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakartaada di Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi sebesar 10.3 %.

Terdapat 17 Jenis lapangan usaha di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2019, Industri merupakan lapangan usaha yang berkontribusi sebesar 0.26, kemudian disusul oleh sektor kontruksi sebesar 0.24, kemudian sektor akomodasi makan dan minum sebesar 0.23 dan terakhir sektor pertanian sebesar 0.22 di Provinsi Yogyakarta. Sedangkan sektor usaha yang berkontribusi sangat kecil ada pada sektor pengadaan air, listrik dan gas serta pengolahan sampah limbah dan daur ulang. Dengan latar belakang Daerah Istimewa Yogyakartayang sangat terkenal dengan kota pelajar maka sangat wajar bila sektor usaha Industri

dan Kontruksi lebih berkontribusi dibandingkan dengan sektor lainnya.



Gambar 3 Indeks entropi theil berdasarkan lapangan usaha

Sebuah fakta yang memprihatinkan bahwa ketimpangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan manakala pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta belum inklusif, artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Salah satu penyebab ini karena Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta jika dilihat dari sisi geografis sangat beragam. Keberagaman geografis ini juga berpengaruh terhadap ketidaksetaraan antar wilayah.

Untuk itu, upaya yang harus dilakukan guna menekan jarak ketimpangan tersebut adalah meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendorong pengembangan sektor padat karya khususnya sektor pertanian dan industri manufaktur.Kedua sektor usaha ini merupakan bidang pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mencapai hal itu, pemerintah daerah perlu menarik investasi langsung di industri padat karya ini.Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat iklim investasi pada industri padat karya lebih dipermudah. Selain itu, pemerataan dari sisi infrastruktur juga harus dilakukan, utamanya dari sisi fasilitas transportasi, karena ketersediaan prasarana dan sarana transportasi akan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di suatu wilayah. Wilayah-wilayah yang semula terisolasi dan terbelakang akan berubah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga berbagai potensi wilayah dapat dimaksimalkan.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka untukmengurangi ketimpangan (secara struktural) di antara berbagai wilayah perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah. Apalagi jika kita sandingkan dengan potensi dan daya tarik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi tujuan wisata diharapkan perbaikan infrastruktur mampu menjadi alternatif dalam perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan pembangunan dapat kita temukan pada maha karyanya yakni muqaddimah dan kekuatan dari teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam konsep asabiyyah. Asabiyyah merupakan faktor yang dominan penentu dari bangkit dan

runtuhnya suatu negara. Assabiyah dibentuk dari sikap altruis atau mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, sifat ini condong kepada sifat dasar manusia yang berasal dari anugrah tuhan yaitu sifat ingin membantu.[8] Adapun faktor-faktor penyebab adanya pertumbuhan atau runtuhnya suatu negara akan dibahas dipembahasan selanjutnya.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Ibnu Khaldun

Didalam kitab muqadimmah ini, Ibnu Khaldun telah menyingkap berbagai hukum tentang perjalanan dan perkembangan sejarah masyarakat. Disini ia menyajikan berbagai contoh tentang bangkitnya suatu negara berikut alasan-alasannya, menjelaskan tentang sebab-sebab runtuhnya bangsa dan peradabannya. Menurut Ibnu Khaldun, assabiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara. Assabiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara, bila ashabiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas sebaliknya bila ashabiyah lemah, maka luas negara yang muncul relatif terbatas.

Negara menurut ibnu khalldun mempunyai umur seperti makhluk hidup yang lain. Umur suatu negara adalah tiga generasi yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Keiga generasi tersebut adalah: pertama,generasi pertama, hidup

[8] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri).(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011) hlm. 523

dalam keadaan primitive yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, biasanya masih tinggal di perdesaan. Generasi kedua berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitid yang keras ke kehidupan kota yang penuh kemewahan. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan dan keberanian.

Negara dalam perkembangannya melalui lima tahap:

a. Tahap pendirian negara. Ini merupakan tahap untuk mencapai tujuan, penaklukan dan merebut kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan ashabiyah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ashabiyah yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak untuk mengalahkan musuh.
b. Tahap pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiyah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat kekuasaanya yang telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan ashabiyah, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota ashabiyah dari roda pemerintahan.
c. Tahap kekosongan. Tahap untuk menikamati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya.

d. Tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini, negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi, negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya.
e. Tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan.

Faktor penentu berkembangnya suatu negara ada pada bagaimana pemimpin nya, bagaimana penegakan hukum nya, sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan bagaimana keadilan yang diterapkan untuk rakyatnya.

Menurut Ibnu Khaldun terciptanya sebuah negara ideal perlu ditunjang oleh 4 kriteria sosiologis yaitu *pertama* lingkungan yang sehat, udara, air, maupun tata letak bangunannya. Kedua secara geografis terletak pada tempat yang startegis serta menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Ketiga terciptanya solidaritas yang kental; ikatan suku agama, bahasa, wilayah maupun rasa kebersamaan senasib. Keempat terletak pada geografis yang subur dan kaya akan hasil buminya.[9] Bila keempat kriteria tersebut didukung olehh kepemimpinan kepala negara yang adil, maka kondisi tersebut akan mempercepat munculnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ibnu Khaldun, pertumbuhan dan keterpurukan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemerintah (G), syariah (S),

[9] Ibid hlm. 401-405

kekayaan ekonomi /sumber daya alam (W), masyarakat/sumber daya manusia (N), pembangunan (D), dan keadilan (J). adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah (S)
2. Syariah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah (G)
3. Pemerintah tidak akan memperoleh kekuasaan tanpa adanya masyarakat (N)
4. Pemerintah yang kokoh tidak akan terwujud tanpa adanya kekayaan ekonomi (W)
5. Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya ekonomi/kekayaan (W)
6. Kekayaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya pembangunan (D)
7. Pembangunan (D) tidak dapat tercapai tanpa adanya keadilan (J)
8. Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan (J)
9. Karena keadilan merupakan mizan yang akan di evaluasi oleh Allah.[10]

Semua variabel tersebut saling tergantung dan saling mempengaruhi. Masing-masing variabel tersebut menjadi faktor yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. secara sederhana, penguasa (G) bertugas dan bertanggung jawab menerapkan syariah. Sebab, tanpa

[10] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri).(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011) hlm. 523

adanya syariah masyarakat akan kacau, negara akan runtuh. Selain itu negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat (N), dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat (W) melalui pembangunan yang adil.

Kita bisa memulainya dengan gerakan pemahaman syariah (S), pengembangan kajian, dan memperaktekannya dalam kehidupan bermasyarakat (N). dalam bidang keagamaan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang cukup bagus dalam hal ini. Hal ini terbukti dari aktifnya risma salah satunya di mesjid jogokarian. Selain itu, terdapat pula acara ngaji bersama yang selalu rutin diadakan seperti yang dilakukan di mesjid jendral sudirman yang berada di kab. Sleman. upaya ini dapat meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat (W) jika masyarakat sejahtera, mereka akan membayar zakat, infaq, shadaqah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi (J). Ketika masyarakat sudah makmur dan sejahtera, maka mereka bisa membangun (D) infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat-pusat pelatihan, sarana ibadah, hotel syariah, jalan dan jembatan dsb. Pembangunan tersebut dilakukan guna mencapai keadilan dan pemerataan rakyat agar hidupnya lebih sejahtera. Jadi dapat disimpulkan ketika ekonomi suatu negara kuat, maka apapun bisa dikuasai.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dan wakil gubernur yang dipilih melalui proses penetapan. Sultan sebagai gubernur dan adipati paku alam sebagai wakil gubernur. Ini merupakan

implementasi dari UU keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. ibukota Daerah Istimewa Yogyakartaadalah Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Undang-Undang Keistimewaan tersendiri yakni Undang-undang no 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan dan belum optimal untuk dikembangkan, antara lain di bidang sumber daya manusia, pariwisata, industri, pertanian, serta pertambangan dan penggalian.

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta terutama diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang relative baik merupakan potensi tenaga kerja yang cukup besar utnuk berbagai kegiatan. Dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian yang memadai, maka Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan industry ataupun pengembangan dibidang lain. Ilmu pengetahuan sangat penting akal pikiran yang menghasilkan ilmu pengetahuan, juga dapat menuntun manusia ke jalan illahi dan meningkatkan derajat manusia sehingga manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, hidupnya jiwa manusia karena ilmu pengetahuan dan gelapnya hati manusia karena miskinya ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah

disampiakan oleh Ali radiyallah uanhu, ilmu adalah merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai yang sangat besar bagi manusia dan lebih besar nilainya dari harta benda. Ada dua alasan yang dikemukakan olehnya yaitu : pertama, ilmu pengetahuan jika digunakan semakin bertambah, sedangkan harta kekayaan jika dibelanjakan semakin berkuran. Kedua, ilmu pengetahuan memelihara pemiliknya, sedangkan harta kekayaan dijaga oleh pemiliknya. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun haruslah mempunyai guru, untuk penguasaan dengan melalui pengulangan dan pemahaman. Tujuan ilmu pengetahuan menurut ibnu khaldun:

1. Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena aktivitas ini sangat penting bagi terbuka pikiran dan kematangan individu, kemudian kematangan ini akan mendapatkan faedah bagi masyarakat.
2. Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, sebagai alat untuk membantunya, hidup dengan baik di dalam masyarakat dan berbudaya.
3. Memperoleh lapangan pekerjaan, yang digunakan untuk memperoleh rizki.[11]

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki objek wisata yang beragam baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alam meliputi panorama kaliurang, rekreasi di pantai parangkritis. Wisata budaya

[11] Fathiyyah Hasan Sulaiman,, *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Dan Pendidikan*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet I, 1987), hlm. 35-36

meliputi candi kalasan, ratu boko, dan prambanan. Wisata sejarah meliputi kawasan keratin Yogyakarta dan Kotagede.

Selain itu, industri mempunyai potensi juga untuk dikembangkan baik industry kecil, industry rumah tangga seperti batik, barang kerajinan dari kulit, perak, logam, bambu, dan tanah liat, maupun industri makanan dan minuman, melihat Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, industry sangat berpotensi untuk dikembangkan agar lebih baik lagi.

Sumber daya pertanian tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakartadengan komoditas potensial seperti padi, palawija, dan hortikultura. Sementara perkebunan di D.I Yogyakarta pada umumnya merupakan perkebunan rakyat, dan perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komoditas andalannya kopi, kelapa, tembakau, lada, kakao, dan cengkeh. Dan di bidang pertambangan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi berbagai bahan galian seperti batu kapur, kalsit, andesit, pasir, koral, dan gips serta tambang kaolin digunung kidul dan tambang pasir di kulonprogo dapat dikembangkan lebih lanjut.[12]

Faktor terpenting ialah keadilan. Semakin tertata demokrasi sebuah negara maka akan semakin sedikit pengecualian yang diberlakukan. Pemerintah harus memenuhi aspek keadilan. Menurut john rawls, jaminan keadilan harus diawali dengan pengaktifan dua prinsip dasar keadilan, *pertama* prinsip kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya. Menurut

[12] Bappenas, Pembangunan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Diunduh Http://Bappenas.Go.Id V Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 00.23

prinsip ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk semua sistem kebebasan yang ada misal kebebasan untuk berpartisipasi dalam sistem politik, kebebasan untuk berbicara, kebebasan beragama dan lain sebagainya. *Kedua* prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil dengan kesempatan. Menurut prinsip ini perbedaan sosial ekonomi harus diatur sampai bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk mereka yang paling tidak beruntung.[13]

Menurut Ibnu Khaldun, keadilan merupakan dimensi utama dalam kehidupan masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan semua masyarakat harus merasakan keadilan dan kesejahteraan. Sistem keadilan dibentuk berdasarkan solidaritas sosial yang berada diatas pondasi solidaritas individu yang menimbulkan rasa kasih-sayang dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Sementara itu, proses kemunduran suatu negara menurut Ibnu Khaldun arahnya melawan jarum jam. Pembangunan (D) yang tidak adil (J) mengakibatkan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan daerah perkotaan lebih maju daripada pembangunan didaerah perdesaan. Hal ini menyebabkan daerah perkotaan lebih maju dalam segala bidang dibandingkan dengan daerah perdesaan akibatnya dalam hal pendapatan daerah pun, daerah perdesaan memperoleh pendapatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan

[13] Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls,*Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 1 April 2009 hlm. 135-151

daerah perkotaan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin terlihat jelas antara kedua daerah tersebut.

Hal ini dapat terlihat dari kasus kulonprogo, sebelum adanya pembanguanan mega proyek bandara YIA, kabupaten kulon progo merupakan kabupaten yang memperoleh PDRB paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Namun setelah adanya pembangunan tersebut. Kab.kulonprogo berhasil menepati posisi pertama penerimaan PDRB tertinggi di D.I. Yogyakarta. . Hal ini menunjukan semakin membaiknya pembangunan yang berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan runtuhnya suatu negara ialah pemimpin yang dzalim, bermewah-mewahan yang menyebabkan pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan, melakukan monopoli dan tidak adanya keadilan dalam sistem pemerintahan.

Penyebab jatuhnya peradaban yang disebabkan oleh jumlah kepadatan penduduk yang berlebih. Penduduk memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subyek pelaksana utama sekaligus obyek penerima manfaat terbesar dari proses pembangunan yang dijalankan. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kuallitas sumber daya manusia akan menjadi modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dan kapasitas modal manusia hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan.

Tabel 11

Jumlah penduduk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Penduduk			Pertumbuhan
	2017	2018	2020	2018-2019 (%)
Kulon Progo	421,295	425,758	430,220	1.05
Bantul	995,264	1,006,692	1,018,402	1.16
Gunungkidul	729,364	736,210	742,731	0.89
Sleman	1,193,512	1,206,714	1,219,640	1.07
Yogyakarta	422,732	427,498	431,939	1.04
D.I Yogyakarta	**3,762,167**	**3,802,872**	**3,842,932**	**1.05**

Sumber : Bps, Proyeksi penduduk D.I Yogyakarta 2010-2020

Populasi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 3.457.491 jiwa dan 3,668,719 jiwa pada tahun 2020. Setiap tahun rata-rata terjadi kenaikan sebanyak 41,37 ribu jiwa penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dan persebaran atau konsentrasi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sampai 2020 masih terpusat di Kabupeten Sleman dan Bantul. Kedua kabupaten memiliki kontribusi jumlah penduduk terbesar dan cenderung meningkat, sekitar 31,7 persen penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan 26,5 persen tinggal di Bantul. Sementara, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta proporsinya hanya sekitar 11 persen. Proporsi penduduk yang

tinggal di Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat semakin menurun. Walaupun demikian, jika dilihat pertumbuhan per tahun ada 4 kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan di atas 1 persen, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul tahun hanya tumbuh 0,89 persen. Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memberi kontribusi sebesar 1,4 persen terhadap total populasi penduduk nasional. Tingginya pertambahan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya diduga karena pengaruh migrasi masuk. Daerah Istimewa Yogyakarta selain memiliki daya tarik sebagai kota tujuan hunian pensiun, juga sebagai kota tujuan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Urbanisasi yang berlebihan dan permintaan akan suatu produk yang tinggi dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya yang pada akhirnya dapat menaikan tarif pajak menjadi tinggi, dan negara melakukan kegiatan monopoli atas kekuasaan dan sumber daya (tirani), hal tersebut dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi karena mahalnya hidup di kota, pajak yang tinggi dan penurunan laba yang selanjutnya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, dan tingkat kemiskinan meningkat karena kekurangan rezeki. Naik turunnya perada ban tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada moral, kelembagaan, psikologis, politik, sosial dan faktor demografis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakartamengalami fluktuasi. selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakartamembaik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor Tingginya kenaikan pertumbuhan ekonomi karena adanya pertumbuhan Penerimaan PDRB di sektor Kontruksi dan sektor transportasi. Selain bandara, terdapat pula pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang seperti pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), underpass bandara YIA, underpass Keuntungan, dan infrastruktur lainnya. Dampak positif dari adanya pembangunan ini adalah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo meningkat secara drastis dan lebih unggul dibandingkan empatkabupaten/kota yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo berhasil menduduki posisi pertama disusul oleh Kabupaten Sleman dengan peringkat kedua, selanjutnya Kota Yogyakarta dengan peringkat ketiga, kemudian kabupaten bantul dengan pringkat keempat dan yang terakhir kabupaten gunungkidul.

   Pada masa Ibnu Khaldun, salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara

harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan Perekonomian. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari sektor pajak. penerimaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan menunjukan adanya peningkatan. jumlah penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak pada tahun 2018 sebanyak 1.717 miliar rupiah lebih, dan pada tahun 2019, jumlah penerimaan pajak mencapai 1.773 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik.

Ibnu Khaldun meyakini dengan adanya pertumbuhan yang terus meningkat akan menyebabkan adanya pertambahan pembangunan infrastruktur diwilayah tersebut, jika pembangunan bertambah maka akan tercipta lapangan kerja yang baru dan bertambah pula pekerjaan-pekerjaan. dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka akan menurunkan angka pengangguran dan efek terakhirnya yaitu akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Adanya fenomena tersebut menandakan bahwa setiap pembangunan dapat memberikan *multiplier effect* yang cukup besar, baik dari percepatan perekonomian sekitar, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan. Selain itu, dengan berkembangnya berbagai pembangunan di kawasan sekitar bandara seperti pembangunan perhotelan, akses jalur kereta api, dan infrastruktur pendukung

lainnya maka akan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2. Berdasarkan perhitungan indeks wiliamson diatas, provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamemperoleh nilai indeks wilamson 0.45 hal ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamasih tergolong rendah. Sedangkan menurut perhitungan entropi theil, provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamemperoleh nilai Indeks Entropi Theil (S Relatif) sebesar 0.89 hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartamasih tergolong kecil. Kab. sleman merupakan daerah yang mendapatkan nilai entropi theil terbesar, yang mencapai 1.21 dengan kontribusi sebesar 30.6% terhadap ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penyumbang terbesar kedua ditempati oleh kota yogykarta dan penyumbang terkecil ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakartaada di Kabupaten Kulonprogo dengan kontribusi sebesar 10.3 %.

   Terdapat 17 Jenis lapangan usaha di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2019, Industri merupakan lapangan usaha yang berkontribusi sebesar 0.26, kemudian disusul oleh sektor kontruksi sebesar 0.24, kemudian sektor akomodasi makan dan minum sebesar 0.23 dan terakhir sektor pertanian sebesar 0.22 di Provinsi Yogyakarta. Sedangkan sektor usaha yang berkontribusi

sangat kecil ada pada sektor pengadaan air, listrik dan gas serta pengolahan sampah limbah dan daur ulang. Dengan latar belakang Daerah Istimewa Yogyakartayang sangat terkenal dengan kota pelajar maka sangat wajar bila sektor usaha Industri dan Kontruksi lebih berkontribusi dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan pembangunan dapat kita temukan pada maha karyanya yakni muqaddimah dan kekuatan dari teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam konsep asabiyyah. Asabiyyah merupakan faktor yang dominan penentu dari bangkit dan runtuhnya suatu negara.

3. Menurut Ibnu Khaldun, pertumbuhan dan keterpurukan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemerintah (G), syariah (S), kekayaan ekonomi /sumber daya alam (W), masyarakat/sumber daya manusia (N), pembangunan (D), dan keadilan (J). Adapun uraiannya sebagai berikut: Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah (S). Syariah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah (G). Pemerintah tidak akan memperoleh kekuasaan tanpa adanya masyarakat (N). Pemerintah yang kokoh tidak akan terwujud tanpa adanya kekayaan ekonomi (W). Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya ekonomi/kekayaan (W). Kekayaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya pembangunan (D). Pembangunan (D) tidak dapat tercapai tanpa adanya keadilan (J). Pemerintah bertanggung jawab untuk

mewujudkan keadilan (J) Karena keadilan merupakan mizan yang akan di evaluasi oleh Allah.

secara sederhana, penguasa (G) bertugas dan bertanggung jawab menerapkan syariah. Sebab, tanpa adanya syariah masyarakat akan kacau, negara akan runtuh. Selain itu negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat (N), dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat (W) melalui pembangunan yang adil.

Kita bisa memulainya dengan gerakan pemahaman syariah (S), pengembangan kajian, dan memperaktekannya dalam kehidupan bermasyarakat (N). dalam bidang keagamaan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang cukup bagus dalam hal ini. Hal ini terbukti dari aktifnya risma salah satunya di mesjid jogokarian. Selain itu, terdapat pula acara ngaji bersama yang selalu rutin diadakan seperti yang dilakukan di mesjid jendral sudirman yang berada di kab. Sleman. upaya ini dapat meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat (W) jika masyarakat sejahtera, mereka akan membayar zakat, infaq, shadaqah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi (J). Ketika masyarakat sudah makmur dan sejahtera, maka mereka bisa membangun (D) infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat-pusat pelatihan, sarana ibadah, hotel syariah, jalan dan jembatan dsb. Pembangunan tersebut dilakukan guna mencapai keadilan dan pemerataan rakyat

agar hidupnya lebih sejahtera. Jadi dapat disimpulkan ketika ekonomi suatu negara kuat, maka apapun bisa dikuasai.

Sementara itu, faktor ketimpangan suatu negara disebabkan karena Pembangunan (D) yang tidak adil (J) mengakibatkan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan daerah perkotaan lebih maju daripada pembangunan didaerah perdesaan. Hal ini menyebabkan daerah perkotaan lebih maju dalam segala bidang dibandingkan dengan daerah perdesaan akibatnya dalam hal pendapatan daerah pun, daerah perdesaan memperoleh pendapatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perkotaan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin terlihat jelas antara kedua daerah tersebut.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan runtuhnya suatu negara ialah pemimpin yang dzalim, tidak diterapkannya syariah dalam bernegara, bermewah-mewahan yang menyebabkan pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan, melakukan monopoli sehingga keadilan tidak terwujud dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pemerintah provinsi D.I Yogyakarta Yogyakartadan para peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi D.I Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat seperti pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan. Kemudian bila melihat jumlah SDM berkualitas yang terus bertambah diharapkan pemerintah menyediakan lapngan kerja yang lebih banyak lagi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta Melakukan pembangunan dan menyediakan akses internet di daerah gunung kidul. Hal ini dilakukan agar wisatawan lebih nyaman saat berkunjung ke daerah gunung kidul.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor lain yang turut berperan dalam ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Almizan., 2016, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Maqdis:* Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Padang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang

Amin Abdullah Muhammad., "usaha memahami kemiskinan secara multidimensional ditinjau dari agama", dikutip dari pada kamis 20 juli 2020, pukul 20:00 WIB

Aprianoor, Pritha., Muhammad Muktiali., 2015, "Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Teknik PWK* Volume 4 Nomor 4 2015, Semarang: Program Sarjana Fakultas Perencanaan Wilayah Universitas Diponegoro

Arifqi Moh. Musfiq., 2019, "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra)", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2. 2019, IAIN Samarinda

Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arman, Dellis., Roesmeli., dan Novita Sari., (n.d)., 2013, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 4.No. 02. 2013, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Arsyad, Lincolin., 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPSTIE-YKPN

Aryanti, Yosi., 2018. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial- Ekonomi Dan Politik", *Jurnal Imara* Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, Padang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar

Badan Pusat Statistic Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021, "Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaDalam Angka 2021" Yogyakarta:Bps Diunduh Pada Tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12:18 Pm

Bappenas, 2021, "Pembangunan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta". Diunduh Http://Bappenas.Go.Id V Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 00.23

Boediono., 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Edisi 1),* Yogyakarta: BPFE.

Bps Kab. Sleman, 2020, "Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)", Diunduh Melalui Https://Slemankab.Bps.Go.Id/Publication.Html Pada Tanggal 14 Juni 2020

Bps kab. sleman, Produk domestic regional bruto, , diunduh melalui https://slemankab.bps.go.id/publication.html pada tanggal 14 juni 2020

Burhanuddin, Hamam., 2015, "Dekontruksi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan". *Edukasi*, Volume 03, Nomor 01, Juni 2015. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Chapra, M. U., 2008, "Ibnu Khaldun's Theory Of Development: Does It Help Explain The Low Performance Of The Present-Day Muslim World? *The Journal Of Socio-Economics*.

Djuwendah, Endah., 2016. "Analisis Potensialitas Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Sumedang". *Paspalum* Vol. Iv No 1 Maret 2016

Dorcas Andhiani Kartira., Erfit., dan Adi Bhakti., 2018 "Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera" *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7. No.1, Januari – April 2018, Jambi: Universitas Jambi.

Erik, lane Jan., svante ersson., 2002, "Ekonomi Politik Kompratif: Demikrasi Dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif", Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Faiz, Pan Mohamad., 2009. "Teori Keadilan John Rawls",*Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 1 April 2009

Fajri, Muhammad., Arman Delis., Yohanes Vyn Amzar., 2016. "Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 9 No. 2. Agustus 2016.

Febri, Astuti Dewi., 2013, "*AnalisisFaktot-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Jawa",* Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, Vol.1, No. 03, 2013. Padang: Universitas Negeri Padang.

Hasibuan, M. Lohot., 2011, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun" *Ar-risalah* Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11 No. 2 Des 2011, Jambi: Fakultas Syariah UIN Jambi.

Islami Fitrah Sari., Nugroho Sbm., 2018. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia". *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 33 No. 1 Januari 2018, Semarang: Universitas Diponegoro.

Jaime,Bonet., 2006, "Fiscal Income Desentralization and Regional Income Disparities-Evidence From the Columbian", *Jurnal Internasional, The Annals Of Regional Science*: Vol 40, 2006.

Juliana Ropi Marlina., Ramdhani Saadillah., dan Siti Maryam., 2018, "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam" *Amwaluna*: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Karim, Adiwarman., Azwar., 2003, *Ekonomi Mikro Islami* (*edisi kedua*). Jakarta: IIIT.

Kasdi Abdurrahman., 2014, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah", *Fikrah,* jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan Vol. 2, No. 1, Juni, IAIN Kudus.

Khaldun, Ibnu., 2011. *Muqaddimah, (Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri*), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Khotimah, Khusnul., 2018. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015". Volume 7, Nomor 6, Tahun 2018

Kurniasih, Erni Panca., 2013, Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznet *Jurnal EKSOS* jurnal ekonomi dan sosial, Volume 9, Nomor 1, Februari, Politeknik Negeri Pontianak.

Mahardiki, Doni., Rokhedi Priyo Santoso., 2013, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011", *Jejak* Journal of Economics and Policy vol 6 no. 2, Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Milles Mattew B. dan A. Michael Hubernam,, 1992, *Qualitatif Data Analisis, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis kualitatif,*. Cet. I Jakarta : UI Prees.

Mohammad, Tahir Sabit Haji, 2010, "Principles Of Sustainable Development In Ibnu Khaldun's Economic Thought", *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 5, Number 1 2010, Malaysia: Faculty of Law International Islamic University Malaysia.

Moleong, Leksi J., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.

Mopangga, Herwin., 2011, "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo", *Trikonomika* Volume 10, No. 1, Juni Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasudan Bandung.

Muttaqin Rizal., 2018, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Maro*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 . No. 2 November 2018, Majalengka: Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka

Nurhuda, Rama., M. R. Khairul Muluk., Wima Yudo Prasetyo., 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, Nomor 4, 2012. Malang: Universitas Brawijaya.

Pasaribu, Cynthia Mutiara., "Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah" *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* Volume 3 Nomor 3, Desember 2015, Semarang: Universitas Diponegoro.

Rahardjo, Adisasmita., 2014, "*Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan"*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rapanna, Patta., Zulfikry Sukarno., *ekonomi pembangunan*, makasar, CV Sah Media, 2017 ebookdiaksesdarihttps://books.google.co.id/books?id=dVNtDwAAQBAJ&pg=PA225&dq=Pertumbuhan+Wilayah+dan+Wilayah+Pertumbuhan+adisasmita+rahardjo&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjRtMGx35fqAhVBAHIKHcPrBWQQ6AEwAXoECAkQAg#v=onepage&q=%20adisasmita%20rahardjo&f=true pada tanggal 23 juni 2020.

Rubiarko, Sabda Imani., Rachmad Kresna Sakti., 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011." *Jurnal Ilmiah* Vol. 1 No. 2, 2013, Malang: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.

S, Murty., 2000. "Regional Disparities: Need And Measure For Balanced Development". In Sukha, Al.Ed., Regional Planning And Suistainable Development.

Sanjaya, Luthfian Riza., Endriatmo Soetarto, Andrea Emma Pravitasari, 2017, "Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur

Dan Pemekarannya)", *Tata Loka* Volume 21 Nomor 2, Mei, 2017, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sanjaya, Luthfian Riza., Endriatmo Soetarto., dan Andrea Emma Pravitasari., 2019. "Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Pemekarannya), *Tata Loka* Volume 21 Nomor 2, Mei 2019.

Santosa, Siswoyo Hari., 2015. "Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan Iv Propinsi Jawa Timur", *Media Trend Vol. 10 No.2 Oktober 2015.*

Say Jean Baptiste., 1971, *A Treatise on Political Economy*. trans. CR Prinsep. New York: Augustus M Kelly.

Sukirno, Sadono., 1985, "*Ekonomi Pembangunan. Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan". (*Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Suryanto Tulus, Femei Purnamasari, Mohamad Kurniawan., 2018, "*Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in IslamicPerspectiv",* Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, 65-71, 2018.

Sukirno, Sadono., 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:Rajawali Pers.

Syafrizal., 2012, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tambunan, Tulus., 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Tarigan, Robinson., 2005. *Ekonomi Ragional Teori Dan Aplikasi (Edisi Revisi*), Jakarta : Pt Bumi Aksara.

Todaro, Michael P., 2011 *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang (Jilid 1) Terj. Agustinus Surbekti*, Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michel p., 2011, *pembangunan ekonomi (edisi ke-sebelas jilid I)*", Jakarta: Erlangga.

Ulum, Bahrul., Mufarrohah., 2016, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam", *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, September 2016 Malang: IAI Al- qolam

Umiyati, Etik., 2013, "Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera" *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.1, No.7 April 2013, Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Vaulina, Sisca., Limetry Liana., 2015, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Riau" *Jurnal Dinamika Pertanian* Volume XXX Nomor 3 Desember 2015, Riau: Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau.

Yusica, Liling Vera., Nazaruddin Malik., dan Zaenal Arifin., 2018, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur", Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 38/Perpus/MIAI/IV/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Siti Hayati
Nomor Induk Mahasiswa	: 18913061
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
Fakultas/Prodi	: MIAI FIAI UII
Judul Tesis	:

Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Didaerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 18 (**delapan belas) %.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2021
Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

2. Curriculum Vitae

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Siti Hayati
TTL	: Semanak, 17 Agustus 1996
Email	: shayati070@gmail.com 18913061@students.uii.ac.id
Alamat	: Jl. Kutilang 14 Demangan baru, kel. Catur tunggal Kec. Depok, Sleman Yogyakarta

PENDIDIKAN

2018-2014	UIN Raden Intan Lampung Jurusan ekonomi islam
2014-2011	SMKN 1 Kalianda Jurusan Akuntansi
2011-2008	MTS Al-Khairiyah Kp. Baru
2008-2002	SDN 3 Semanak

PENGALAMAN ORGANISASI

2019	IKA RIL Yogyakarta (Ikatan Alumni Raden Intan Lampung)
2018-2014	RISEF (Raden Intan Sharia Ekonomi Forum)
2014	HMI
2014-2011	Rohis SMKN Kalianda
2011-2008	Pramuka

KARYA TULIS

2021 "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)" oleh SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, p 1 - 6,

2020 "Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar)" oleh MEIS, Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 7 No. 2 Juli – Desember 2020, p 180-195,

"Cover Song di Youtube dalam Perspektif Ekonomi Islam" oleh ADZKIYA Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 Nomor 2 SEPTEMBER 2019, p. 213-236

2019 Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah, oleh MILLAH Vol. 19, No. 1, Agustus 2019